

ANALISIS SISTEM PEMETAAN PERMASALAHAN DAERAH RAWAN KONFLIK KHUSUSNYA DI WILAYAH POSO, SULTENG (Hasil Penelitian)

1. Latar Belakang

Tragedi Poso yang begitu menyakitkan jiwa bangsa telah membekaskan luka yang sangat dalam. Masyarakat yang pada awalnya tidak mengerti pada akar persoalan yang terus meluas itu justru menjadi sasaran korban yang paling banyak. Ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat yang sudah tertata ratusan tahun rusak hanya dalam hitungan bulan.

Persaudaraan yang terjalin sejak nenek-moyang bangsa ini lahir di bumi tercinta ini menjadi porak poranda. Para saudara satu nenek saling bunuh tanpa sedikitpun rasa penyesalan. Dendam telah menenggelamkan kebudayaan persaudaraan antar suku dan umat beragama yang selama ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi.

Bau mesiu, denting parang menjadi ilustrasi yang memilukan. Bau darah merebak sampai ke pelosok desa. Tulang-belulang berantakan dimana-mana. Rumah yang mereka bangun bersama-sama tinggal puing berserakan yang ditinggal penghuninya entah kemana. Agama yang justru mengajarkan kasih-sayang hakiki justru berubah menjadi momok yang menyeramkan. Agama telah dirubah menjadi simbol dan bendera perjuangan yang tak jelas lagi. Agama menjadi sasaran kemarahan dan dendam yang terus melekat entah sampai berapa dasawarsa ke depan dimana anak-cucu sudah terlanjur berubah menjadi monster

yang setiap saat menerkam saudaranya sendiri.

Pembangunan di segala sektor yang mestinya menjadi harapan masyarakat Poso justru semakin jauh dari kenyataan. Potensi sumberdaya yang dimiliki daerah itu menjadi mubazir dan tak mempunyai nilai ekonomi lagi akibat dari konflik yang bahkan semakin menambah daftar panjang kerugian materi dan moril.

Selama kurun waktu tiga tahun, tercatat 10.650 rumah hangus, 823 rumah rusak berat, 554 rumah rusak ringan, 37 gereja hangus dan 21 masjid terbakar. Dan ini mengakibatkan pengungsian besar-besaran, tercatat ke Palu 22.940 jiwa, Kabupaten Poso sendiri 43.443 jiwa, Kabupaten Donggala 11.827 jiwa dan Morowali 10.757 jiwa.

Kita semua, bangsa besar ini, Indonesia tercinta, bertanggungjawab terhadap tragedi yang memilukan ini. Kesadaran untuk bersama-sama menyelesaikan konflik berdarah ini harus cepat diwujudkan, dan itu berada di bahu seluruh bangsa, tak terkecuali.

Sejauh ini memang telah dilakukan beberapa rekonsiliasi, namun kenyataannya selalu gagal. Rekonsiliasi dan beberapa pendekatan dialog ternyata tidak menyentuh seluruh akar permasalahan. Bahkan semakin memunculkan permasalahan baru yang semakin kompleks dan tampak ada kecenderungan dieksploitir oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.

Untuk itulah penelitian ini diharapkan dapat mencarikan akar permasalahan dari konflik yang eskalasi dan perkembangannya semakin luas dan meningkat itu.

2. Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas dapat diteliti perumusan masalah sebagai usaha menemukan pemecahan konflik, yaitu:

- Apa penyebab, latar belakang dan akar masalah terjadinya konflik?
- Bagaimana sebenarnya peta konflik di Poso?
- Faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan rekonsiliasi dan beberapa usaha penyelesaian konflik lainnya?
- Bagaimana pola-pola penyelesaian konflik yang sesuai dan tepat-sasaran dapat dirumuskan?

3. Maksud dan Tujuan

- Memetakan konflik yang terjadi di Poso untuk menelusuri penyebab dan pemicu konflik.
- Memberikan saran dan usulan tentang pola-pola penyelesaian konflik.

4. Metodologi

Melakukan observasi terhadap isu-isu konflik merupakan teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data-data dan informasi.

Selain mendapatkan data dari nara sumber yang ikut terlibat dalam konflik, juga dipilih nara sumber yang sangat memahami dan menguasai permasalahan konflik atau mereka yang terkait isu-isu permasalahan yang akan diteliti.

Selain itu juga melakukan pengolahan informasi dan data yang bersumber dari internet, buku-buku, kliping koran dan majalah, makalah dan sumber-sumber

lain melalui seminar-seminar yang kemudian dirancang sebagai suatu laporan yang saling menunjang untuk dicocokkan dengan temuan di lapangan.

Lokasi penelitian adalah daerah-daerah terutama di Poso Kota dan daerah-daerah rawan konflik lainnya di bawah Polda Sulawesi Tengah.

5. Situasi dan Kondisi Kabupaten Poso

a. Letak Geografis

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Poso persis di antara teluk Tomini dan teluk Tolo. Wilayah itu memanjang dari barat ke timur pada titik koordinat $0^{\circ} 06' 56'' - 3^{\circ} 37' 41''$ LS dan $120^{\circ} 05' 25'' - 123^{\circ} 06' 17''$ BT.

Kabupaten Poso yang luasnya 14.433,76 km² terletak di Propinsi Sulawesi Tengah meliputi di : sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banggai dan pesisir Teluk Tolo sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomini sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan) dan Kendari (Sulawesi Tenggara).

Kabupaten Poso merupakan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Donggala. Pusat pemerintahan Kabupaten Poso terletak di Kecamatan Poso Kota.

Kabupaten Poso sejak 5 Desember 2000 di pecah menjadi dua menjadi: Kabupaten Poso: 13 kecamatan dengan Poso Kota sebagai ibu kotanya dan Kabupaten Morowali di bagian timur: 8 kecamatan dengan ibukota Bungku. (*Kantor statistik Propinsi Sulawesi Tengah*)

Sebagian besar wilayah Kabupaten Poso ($\pm 73\%$) merupakan daerah hutan yang meliputi: hutan lindung, hutan produksi biasa, hutan suaka alam dan wisata alam serta hutan konversi. Sedangkan selebihnya adalah hunian, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Berdasarkan data elevasi (ketinggian di atas permukaan air laut), sebagian daerah Poso berada pada ketinggian.

Wilayah daratan Kabupaten Poso yang memiliki kemiringan lebih dari 40° adalah seluas $52,76\%$ yang memiliki kemiringan $15^\circ - 40^\circ$ adalah seluas $26,93\%$ dan yang memiliki kemiringan antara $0^\circ - 15^\circ$ adalah 20% .

Sungai-sungai yang berada di Kabupaten Poso ialah:

- 1) Sungai Poso, panjang 488 km, lebar 25 m dengan luas daerah aliran 96.000 Ha, berhulu di danau Poso dan bermuara di Teluk Poso, dapat dilayari oleh Kapal Motor.
- 2) Sungai Laa, panjang 365 km, lebar 15 m dengan luas daerah aliran 192.800 Ha, berhulu di pegunungan Pamona serta bermuara di Teluk Tomini.
- 3) Sungai Bongka, panjang 1.053 km, lebar 20 m dengan luas daerah aliran 327.500 Ha, berhulu di pegunungan Pampapengo dan bermuara di Teluk Tomini dengan kedalaman 1,5 m.
- 4) Sungai Tabulako, panjang 717 km, lebar 12 m dengan luas daerah aliran 174.300 Ha, berhulu di pegunungan Pampapengo dan bermuara di Teluk Tolo.
- 5) Sungai Tambarana, panjang belum pernah diukur, berhulu di pegunungan Molengraf dan ber-

muara di Teluk Tomini.

- 6) Sungai Bananbala, berhulu di pegunungan Mararompi dan bermuara di Teluk Tolo.

Di Kecamatan Pamona Utara terdapat Danau Poso dengan panjang 34 km, lebar 6 s.d. 12 km, menghubungkan Tentena dan Pendolo, dapat dilayari kapal berbobot 100 ton, banyak menghasilkan beberapa jenis ikan.

Jarak antara kota Palu yang menjadi ibukota Propinsi Sulawesi Tengah dan pusat Kabupaten Poso adalah 220 KM. Jarak tersebut dapat ditempuh dengan kendaraan darat ke arah timur dengan waktu tempuh kurang lebih 6 jam. Selain itu Poso juga dapat dicapai melalui jalur udara, waktu tempuh dari Bandara Mutiara sampai ke bandara Kasih Guncu adalah kurang lebih 30 menit. Poso juga dapat dicapai melalui laut dengan berlabuh di pelabuhan laut Poso (Bone Sompe).

b. Wilayah

- 1) Sektor perhubungan

Laju perkembangan sarana perhubungan di Sulawesi Tengah dapat membawa dampak seperti:

 - a) Perkembangan sektor perhubungan darat

Jaringan jalan darat:

 - (1) Palu-Dolo-Parigi-Am-pibabo-Sausu-Poso (Klas IV)
 - (2) Poso-Tentena-Taripa-Kamba-Tomata-Pape (Klas IV)
 - (3) Poso-Malei-Uekuli-Marrowo-Ampana-Borone (Klas IV)
 - (4) Tentena-Pendolo-Wotu (Klas IV)

(5) Luwuk-Pagimana-Bunta-Ampana-Poso (Klas IV)

(6) Palu-Parigi-Poso-Taripa-Pendolo-Ujung

Peningkatan jaringan jalan Trans Sulawesi juga meningkatkan arus kendaraan dan barang sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Disamping dampak positif juga menimbulkan dampak negatif berupa lancarnya mobilitas kejahatan, serta meningkatnya jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

b) Pembangunan sektor pelayaran laut.

Perhubungan laut sangat memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian daerah Sulawesi Tengah, Pelabuhan Pantoloan merupakan pelabuhan terbesar baik sebagai prasarana naik turunnya penumpang maupun barang antar pulau serta sebagai pelabuhan import.

c) Perkembangan sektor perhubungan udara

Pelabuhan udara mutiara Palu merupakan pintu masuk wisatawan ke daerah Sulawesi Tengah, hal ini tentu membawa dampak positif dalam perolehan devisa negara khususnya pendapatan daerah Sulawesi Tengah. Pelabuhan Udara Kasih Guncu di Poso dapat didarati jenis pesawat Tanssal/Hercules.

2) Jaringan Komunikasi:

a. Sarana Komunikasi elektronik meliputi:

- Telepon seluler/handphone.

- Telepon dengan satelit bumi kecil

- Faksimili, teleks, SSB

- TVRI dan RRI

- HT, CB dan Radam

b. Sarana Komunikasi media cetak meliputi:

- RRI

- Surat kabar: Kompas, Angkatan Bersenjata Post, Memorandum, Radar Sulteng, Surya, Palu Post, Tinombala, dan lain-lain.

- Majalah: Tempo, Detik, Jakarta, Fakta, Selecta, Kartini, Pertiwi, Intisari, Bola, Nova, dll.

- Sarana Pos dan Giro: Surat, Wesel, Warkat Pos, Pos Paket dan Kartu Pos.

3) Bangunan-bangunan Penting:

a). Proyek Vital:

- PLTD Moengko di Poso

- PLTD Pos di Poso

- PLTD Tentena di Tentena

b). Obyek Vital:

- PLTD Tentena di Tentena

- Obyek Wisata Cagar Alam/patung megalitik di Napu Poso

- Obyek Wisata danau Poso di Tentena

- Goa Alam di tepi danau Poso di Tentena

c). Pabrik-pabrik penting:

- Pabrik Minyak kelapa Sulatengko di Ampana Poso

4) Keadaan Iklim dan Cuaca

a). Musim (2 musim):

Musim Barat umumnya terjadi antara bulan Oktober s.d. Maret, ditandai dengan banyaknya turun hujan.

Musim Timur terjadi antara bulan April s.d. September ditandai dengan kurangnya musim hujan.

b). Iklim (4 iklim):

Iklim Laut Tropis ditandai dengan banyaknya turun hujan jenis AW (Tropical Wet dan Dry Ultimate)

Iklim Laut Tropis dengan banyaknya turun hujan jenis AF (Tropical Wet Climate)

Iklim Laut Tropis AM (Moonson Rain Forest Climate)

Iklim Laut Tropis dengan banyaknya turun hujan jenis CF (Humid Subtropical Climate)

c). Suhu:

Daerah pegunungan pada siang hari antara 23-27 C sedangkan pada malam hari 11-17 C.

Dataran rendah suhu berkisar antara 30-40 C pada siang hari sedangkan pada malam hari antara 18-28 C.

d). Angin:

Angin barat terjadi pada bulan Oktober s.d. Maret bertiup dari arah barat ke tenggara sehingga terjadi ombak besar dan sukar dilayari motor kecil. Sedangkan laut pantai timur tidak berombak.

Angin timur terjadi pada bulan April s.d. September bertiup dari arah tenggara ke barat laut, sehingga di

Teluk Tomini terjadi ombak besar sedangkan laut Sulawesi dan Makassar tenang. Musim Pancaroba (angin bertiup berubah arah) terjadi pada bulan Maret, April, September dan Oktober.

e). Keadaan Terang:

Awal fajar terjadi sekitar pukul 05.00 Wita. Matahari terbit pukul 06.00 Wita terbenam pada pukul 17.45 Wita.

Bulan terbit dan terbenam setiap harinya berbeda sekitar 1 s.d. 5 menit dengan hari sebelumnya.

c. Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Poso: 13 jiwa/km². Tahun 1997, penduduk Kabupaten Poso berjumlah 402 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode 1980-1990 sekitar 2,71 persen pertahun, tapi selama periode 1990-1995 terjadi penurunan menjadi 2,48 persen pertahun. Di Kecamatan Poso Pesisir, terjadi penurunan 30,63 persen, di Kecamatan Poso Kota terjadi penurunan 27,51 persen, dan di Kecamatan Lage ada penurunan 7,49 persen. Penurunan jumlah penduduk di tiga Kecamatan tersebut, terkait dengan konflik Poso yang terjadi sejak Desember 1998. Tiga Kecamatan itulah yang paling parah menerima akibat konflik itu (lihat tabel 1)

Setelah Poso dipecah menjadi dua kabupaten pada akhir tahun 2001, penduduk Kabupaten Poso berjumlah 247,4 ribu jiwa. Dilihat dari penyebarannya sebagian besar penduduk masih berpusat di ibukota kabupaten (Kecamatan Poso Kota) dan kecamatan-kecamatan Poso

Pesisir, Pamona Utara, Pamona Selatan dan Ampana Kota. Sekitar 12,2 persen penduduk tinggal di Poso Kota yang luas wilayahnya hanya sekitar 0,04 persen dari luas seluruh wilayah daratan Kabupaten Poso.

Agama yang dianut penduduk Poso telah membentuk pola penyebaran penduduk dan juga berkaitan dengan garis etnis penduduk yang ada disana. Selain itu juga banyak pendatang dari Bugis (mayoritas beragama Islam), Toraja (mayoritas beragama Protestan) dan Sulawesi Utara (mayoritas beragama Pro-

testan). Penduduk transmigrasi berjumlah 20.029 KK/83.089 Jiwa, meliputi: Kaum Jawa (mayoritas beragama Islam), Bali (mayoritas beragama Hindu Bali), Nusa Tenggara Timur (mayoritas beragama Katolik).

Di Poso, suku bangsa asli disebut Pamona, sedangkan yang lain disebut sebagai pendatang. Suku Pamona berjumlah 18,10% dari seluruh penduduk Poso, dengan domisili mayoritas di Kecamatan Pamona Utara dan Pamona Selatan. Suku Ta'a dominan di kecamatan Ulu Bongka, suku Gorontalo terbanyak

Tabel 1 : luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Poso Tahun 1997 dan 2001

No	Kecamatan	Luas/Km2	1997	2001	Persentase terhadap Penduduk Kabupaten
1	Pamona selatan	1.047	22.643	23.325	9,43
2	Pamona utara	1.287	29.938	23.517	9,51
3	Pamona timur	702	-	7.888	3,19
4	Lore selatan	998	7.459	8.010	3,42
5	Lore tengah	1.627	12.919	12.364	5,00
6	Poso pesisir	965	-	3.680	1,49
7	Poso kota	1.623	31.273	21.694	8,77
8	Lage	60	41.747	30.261	12,23
9	Tojulu bongka	401	15.015	13.890	5,65
10	Tojo	2.158	20.086	17.099	6,91
11	Ulu bongka	1.767	8.765	11.727	4,74
12	Ampana tete	796	15.362	15.883	6,42
13	Ampana kot	237	25.714	26.229	10,60
14	Una-una	527	17.570	19.226	7,77
15	Walea kepulauan	235	11.901	12.434	5,03
	Kab. Poso	14.433	260.392	247.371	100,00

Catatan: Jumlah penduduk tahun 1997 tidak termasuk 8 kecamatan yang terjadi Kabupaten Morowali

Sumber: BPS Kab. Poso, *Kabupaten Poso dalam angka 1997 dan Kabupaten Poso dalam angka 2001*. (ipsk-lipi) hal. 15 - 2003

di Kecamatan Ampana Kota, suku Bare'e dominan di Kecamatan Tojo, suku Bugis terbanyak di Kecamatan Poso pesisir dan Lore Utara, suku Bada dominan di Kecamatan Lore Selatan, suku Togian banyak di Kecamatan Una-una dan Walea Kepulauan dan suku Jawa banyak di Poso pesisir.

1) Masalah Azas:

Pada umumnya masyarakat (Sulawesi Tengah) telah menerima Pancasila sebagai ideologi, namun di era reformasi saat ini ada kelompok yang menilai bahwa Pancasila kurang dapat menjamin keutuhan bangsa se-

hingga diperlukan ideologi lain yang berlandaskan agama sebagai ideologi dan azas dalam organisasinya, hal ini tetap merupakan ancaman potensial terhadap eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Masalah Ekstrem/Radikal:

Berdasarkan fakta, menunjukkan adanya kegiatan yang mengarahkan masyarakat pada fanatisme agama sempit yang dapat memicu aktifitas masyarakat untuk berbuat anarkis, destruktif. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, guna mencari solusi agar tidak men-

Tabel 2: Persentase Pemeluk Agama Menurut Kecamatan Tahun 2001

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Total
1	Pamona selatan	34,65	57,09	0,19	8,07	-	100
2	Pamona utara	15,44	82,06	0,10	2,35	0,05	100
3	Pamona timur	-	-	-	-	-	-
4	Lore selatan	6,02	93,46	0,52	-	-	100
5	Lore tengah	11,58	85,93	2,49	-	-	100
6	Poso pesisir	-	-	-	-	-	-
7	Poso kota	46,55	45,19	0,30	7,96	-	100
8	Lage	57,67	40,52	1,40	0,21	0,20	100
9	Tojulu bongka	31,67	67,96	0,24	-	0,11	100
10	Tojo	74,32	25,68	-	-	-	100
11	Ulu bongka	64,54	30,13	1,33	4,00	-	100
12	Ampana tete	93,94	6,06	-	-	-	100
13	Ampana kot	96,88	2,48	0,19	-	0,45	100
14	Una-una	98,86	1,00	0,06	-	0,08	100
15	Walea kepulauan	99,37	0,54	-	0,04	0,05	100
	Kab. Poso	62,82	34,36	0,52	1,92	0,38	100

Sumber: BPS Kab. Poso, Kabupaten Poso Dalam Angka 2001, (ipsk-lipi) hal. 16 - 2003

Tabel 3: Komposisi Minoritas-Mayoritas Agama
Di Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Lage

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Agama Dominan
1	Poso Kota	Gebang Jaya	Islam
		Kayamaya	Islam
		Mo-Engko	Islam
		Bonesompe	Islam
		Lawanga	Islam
		Lombogia	Kristen
		Kasintuwu	Kristen
		Sayo	Islam-Kristen
		Kawua	Kristen
		2	Lage
Tagolu	Kristen		
Silanca	Kristen		
Sepe	Kristen		
Sintuwu lembah	Kristen		
3	Poso Pesisir	Toini	Islam
		Mapane	Islam
		Betania	Kristen
		Kasiguncu	Kristen
		Masamba	Islam
		Saatu	Kristen
		Tokorondo	Islam
		Tangkura	Kristen
4		Pinedapa	Islam-Kristen
		Kilo	Islam-Kristen

Sumber: BPS Kab. Poso, Kabupaten Poso Dalam Angka 2001, (*ipsk-lipi*) hal. 16 - 2003

jadi permasalahan yang serius dan mengarah pada tindak pidana serta mencegah provokasi yang menyulut emosi massa dengan isu-isu keagamaan yang menyesatkan.

3) Masalah Partai Politik:

Dari 24 Partai Politik yang lolos verifikasi di KPU Pusat, 15 partai di (Sulawesi Tengah) tidak lolos. Dalam pelaksanaan demokrasi akan membawa dampak kepada

masyarakat tentang pemahaman politik, sehingga diharapkan akan memberikan situasi yang aman dan damai bagi masyarakat yang melaksanakannya serta bukan menjadi timbulnya rasa takut masyarakat.

4) Masalah Hukum:

Tingkat kesadaran hukum masyarakat di (Sulawesi Tengah) pada umumnya masih sangat rendah terutama masyarakat yang

Tabel 4 : Persentase Penduduk Kabupaten Poso
Menurut Kecamatan dan Suku Bangsa tahun 2000

Kec.	Pamona	Ta'a	Goron- talo	Bare'e	Bugis	Bada	Togian	Jawa	Lainnya	Total
Pamona Selatan	57,84	0	0.13	0	4.80	0.03	0	9.98	27.22	100
Lore Selatan	0,44	0	0.00	0.01	0.39	96.83	0	0.00	2.34	100
Pamona Utara	71,60	0.03	0.17	0.02	0.41	2.02	0	1.75	24.00	100
Pamona Timur	20,34	0	0.41	0	2.29	0.10	0	0.64	76.23	100
Lore Utara	1,20	0	0.05	0.01	12.43	4.27	0	5.57	76.47	100
Lore Tengah	0,03	0	0.00	0	0.15	0.00	0	0.09	99.72	100
Poso Pesisir	6,01	1.18	1.77	0.57	12.45	0.10	0	11.08	66.84	100
Lage	40,30	0	0.76	2.12	0.12	0.32	0	1.90	54.47	100
Poso Kota	21,53	0.22	11.21	2.08	3.34	5.42	0	2.82	53.38	100
Tojo	3,36	0.80	4.11	45.37	10.19	0.12	0	2.84	33.22	100
Ulu Bongka	0,23	66.09	3.32	5.64	2.82	0.12	0.03	8.57	13.18	100
Ampana Tete	0,08	32.22	14.89	6.96	9.63	0.20	0.20	9.03	26.79	100
Ampana Kota	0,15	24.56	28.78	16.76	9.55	0.05	0.45	1.13	18.56	100
Una-una	0,06	8.36	13.29	2.45	7.48	0.28	23.35	0.34	44.39	100

tinggal di daerah pesisir pantai dan pedesaan sehingga sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan/main hakim sendiri dan mudah terpancing oleh issue-issue negatif. Di sisi lain masih terdapat oknum penegak hukum yang bertindak secara sembarangan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga masyarakat awam menilai bahwa untuk mencari keadilan saat ini sukar didapat.

- 5) Masalah Pengawasan Melekat: Upaya pemerintah dalam menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa terus dikembangkan dalam rangka memasuki era tinggal landas melalui program waskat. Pelaksanaan program waskat ini menimbulkan pengaruh psycologis bagi

pelaksanaannya terutama oknum yang kurang memahami dan menyadari arti waskat, oleh karena akan tetap mencari peluang untuk kepentingan pribadinya.

- 6) Masalah Aparatur Negara: Hubungan Aparatur Negara/Pemerintah dan masyarakat (Sulawesi Tengah) cukup mantap dan harmonis, namun demikian perlu peningkatan oleh karena masih terdapat oknum aparat pemerintah yang ingin dilayani masyarakat yang memerlukan bantuannya sehingga menimbulkan anggapan negatif masyarakat terhadap seluruh aparat itu sendiri.
- 7) Masalah Organisasi Massa: Pada era reformasi sekarang ini, dimana semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya de-

ngan dikuatkan oleh undang-undang pemerintah yang mengaturnya, telah memberikan nuansa lain dalam kegiatan berdemokrasi dengan membawa dampak positif yaitu banyaknya berdiri organisasi-organisasi baik dari kalangan intelektual, mahasiswa, tokoh masyarakat dan agama maupun pemuda serta LSM. Namun masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap kebijaksanaan pemerintah serta adanya kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan kelompoknya, kadang kala dilakukan dengan mengeksploitir permasalahan sosial yang ada di Sulteng dan melakukan unjuk rasa dan pemutar balikan fakta.

e. Perekonomian

Seperti telah dikemukakan, Kabupaten Poso terletak antara Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Di sekitar wilayah ini, ada provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Posisi ini tentunya menguntungkan Poso.

Keberadaan Trans-Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Palu, dengan Sulawesi Selatan semakin menambah arti penting kabupaten Poso. Trans-Sulawesi ini telah memperlancar arus barang dan orang melewati Poso.

Dengan demikian masyarakat Poso di sekitar Trans-Sulawesi semestinya bisa mengambil manfaat lebih besar yang pada akhirnya akan menambah dan meningkatkan ekonomi mereka.

Selain itu kabupaten Poso mempunyai potensi perekonomian yang

besar. Sektor pertanian adalah yang terbesar di Poso. Sektor ini terbagi ke dalam beberapa sub sektor. Dalam sub sektor pertanian tanaman pangan terdapat padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Perkembangan produksi padi di kabupaten Poso, pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 36,43 % dari tahun sebelumnya, yaitu dari 44.579 ton (2000) menjadi 60.818,96 ton (2001).

Peningkatan produksi padi ini dipengaruhi oleh kembalinya petani bekerja, karena keadaan yang semakin kondusif. Hasil padi ini akan meningkat lagi, bila semua sawah kembali dimanfaatkan secara optimal. Di kabupaten Poso, luas lahan sawah dari berbagai sistem perairan adalah 22.515 ha.

Tanaman Palawija terdiri dari tanaman jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Produksi tanaman jagung mengalami peningkatan dari 22.892,85 ton (2000) menjadi 28.792,85 ton (2001). Sedangkan produksi tanaman ketela pohon mengalami penurunan dari 2.440 ton (2000) menjadi 2.188,47 ton (2001). Produksi tanaman ketela rambat juga mengalami penurunan dari 937 ton (2000) menjadi 131,18 ton (2001). Produksi tanaman kacang tanah juga menurun, dari 386 ton (2000) menjadi 83,18 ton (2001). Tidak begitu jelas mengapa ketiga tanaman palawija tersebut mengalami penurunan produksi.

Sementara itu produksi tanaman kedelai mengalami peningkatan sebesar 74,33 % dari 220 ton (2000) menjadi 383,52 ton (2001). Produksi tanaman kacang hijau juga

mengalami peningkatan sebesar 7,76 % dari 86 ton (2000) menjadi 90,98 ton (2001).

Dalam sub sektor perkebunan terdapat perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Komoditi tanaman perkebunan ini merupakan tanaman perdagangan yang mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini karena perkebunan merupakan sumber penghasilan devisa. Disamping itu perkebunan juga dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Yang dimaksud perkebunan besar adalah yang dikelola oleh perusahaan.

Sebelum Kabupaten Poso dimekarkan, ada perkebunan besar cacao, kelapa sawit dan teh. Setelah pemekaran, di Poso masih ada perkebunan kelapa sawit dan teh. Sedangkan perkebunan cacao masuk kedalam wilayah Kabupaten Morowali.

Sementara itu perkebunan rakyat, dikelola oleh rakyat banyak, tersebar di berbagai kecamatan. Tanaman perkebunan rakyat ini meliputi coklat, kelapa, cengkeh, kopi, jambu mete, vanili, pala, lada dan kemiri. Sebagian perkebunan rakyat ini akan terlihat bila kita melewati jalan darat dari Palu ke Poso, terus ke Ampana.

Namun belakangan ini, lahan perkebunan/pertanian pasca kerusuhan ada yang dikuasai oleh pihak lain dan belum ada upaya penertiban.

Di Cagar Alam Tanjung Api Kabupaten Poso terdapat kebun rakyat. Pemerintah tidak lagi memperkenankan penambahan tanaman di areal tersebut.

Luas areal hutan di Kabupaten Poso:

- Hutan Lindung 309.829 Ha
- Suaka Alam dan Wisata 145.452 Ha
- Hutan Produksi Biasa 90.901 Ha
- Hutan Produksi Terbatas 278.942 Ha
- Hutan yang dapat dikonversi 37.378 Ha

Kayu bulat, kayu olahan, rotan dan damar merupakan hasil hutan terbesar di Poso. Namun sering terjadi penyeludupan rotan baik mentah maupun kering. Hal ini terjadi karena di daerah ini belum ada industri yang mengolah hasil rotan secara besar-besaran, sedangkan harganya dibandingkan dengan di luar negeri sangat berbeda jauh.

Ebony merupakan kayu yang hanya dihasilkan oleh Kabupaten Poso dan Donggala, yang memiliki nilai ekspor yang paling baik kualitasnya dibanding dengan ebony dari daerah lain sehingga harganya sangat menyolok/mahal bila dibandingkan dengan harga kayu lainnya.

Oleh karena harganya sangat mahal, sering terjadi pencurian dan penyelundupan ebony. Pemerintah telah lama mengupayakan penertiban ebony tersebut namun hingga saat ini belum tuntas karena sering terjadi tumpang tindih ketentuan-ketentuan tersebut.

Di Kabupaten Poso juga terdapat peternakan dan perikanan baik perikanan laut maupun perikanan darat. Peternakan ini meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing dan babi. Ada juga jenis unggas yakni ayam dan itik. Hasil peternakan ini disamping untuk konsumsi penduduk Poso juga dikirim ke Propinsi lain. Semen-

tara itu, hutan di Poso menghasilkan kayu bulat, olahan dan hasil hutan non kayu seperti rotan dan damar.

Selain sektor pertanian, kabupaten Poso juga mengembangkan sektor industri. Pengembangan industri ini untuk menunjang pembangunan jangka panjang yang bisa mengubah struktur ekonomi secara fundamental. Pembangunan industri itu dilakukan secara bertahap, maka dalam jangka panjang diharapkan akan tercapai struktur ekonomi yang berimbang dengan titik berat kekuatan industri yang tentunya melalui dukungan sektor lain.

Perusahaan perindustrian diklasifikasikan atas; industri besar, industri sedang dan kecil serta industri kerajinan. Pada tahun 2001, di Kabupaten Poso terdapat 447 industri kecil dan 974 industri kerajinan. Dengan demikian, seluruhnya berjumlah 1.421 perusahaan. Berdasarkan jenis usahanya, maka perusahaan industri di Poso dapat dikelompokkan menjadi 8 kelompok industri, yaitu :

- Industri makanan, minuman dan tembakau berjumlah 324 perusahaan.
- Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit berjumlah 88 perusahaan.
- Industri kayu dan bahan-bahan dari kayu berjumlah 470 perusahaan.
- Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan berjumlah 29 perusahaan.
- Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, karet dan barang-barang plastik berjumlah 4 perusahaan.
- Industri barang-barang galian

bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara, 118 perusahaan.

- Industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapan berjumlah 153 perusahaan.
- Industri pengolahan lainnya, berjumlah 235 perusahaan.

Sementara itu pertumbuhan perusahaan perdagangan di Poso pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 25,76% dari 1.906 perusahaan (2000) menjadi 1.415 perusahaan (2001). Penurunan tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan perdagangan yang tutup, sebagai akibat dampak dari krisis moneter dan krisis ekonomi yang berkepanjangan serta ditambah dengan adanya konflik sosial.

Mata Pencacarian Penduduk di Sulawesi Tengah:

● Pegawai Negeri/ Daerah	32,25%
● Pertanian, Buruh dan hutan	38,75%
● Pertambangan	1,09%
● Industri Pengolahan	20,15%
● Bangunan	1,31%
● Perdagangan dll.	1,90%
● Angkutan	1,46%
● Keuangan, Asuransi	0,05%
● Jasa-jasa	1,50%
● Lain-lain	1,19%

Pengaruh resesi dunia terhadap perekonomian negara Indonesia khususnya amat terasa, namun akhir-akhir ini terasa laju perekonomian daerah ini terus meningkat terutama pendapatan dari sektor non migas dan peningkatan pendapatan asli daerah terus ditingkatkan seperti pajak dan lain-lain. Pengaruh resesi ekonomi menengahkan dibawah adalah naiknya beberapa bahan pokok

sehari-hari namun tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Persediaan sembako di daerah ini cukup, sedangkan harganya mulai terlihat adanya kenaikan setelah kenaikan harga BBM secara berkala. Namun demikian tidak terjadi manipulasi secara besar-besaran dan harga tersebut masih dalam jangkauan/daya beli masyarakat. Sedangkan untuk beberapa daerah terpencil dan daerah kepulauan, harga dan persediaan barang sering terjadi kenaikan mendadak oleh karena masih tergantung pada keadaan alam.

Meningkatnya aktifitas masyarakat pada pusat-pusat kegiatan ekonomi rakyat seperti pasar, pertokoan dan sarana-sarana perbelanjaan lain terus berkembang sejalan dengan pesatnya pembangunan nasional, dalam kondisi demikian akan terjadi persaingan usaha sehingga memungkinkan terjadinya penipuan, penggelapan dsb. Dan satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah timbulnya kecemburuan sosial mengingat pada pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan masih didominasi oleh pedagang cina dan WNI keturunan.

Jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun terus bertambah sedang lowongan pekerjaan yang tersedia setiap tahunnya tidak seimbang dengan calon tenaga kerja yang terdaftar sehingga terjadi pengangguran semu. Keadaan ini sering dimanfaatkan oleh para calo tenaga kerja sehingga terjadi penipuan. Sedangkan upah kerja pada beberapa perusahaan di daerah ini masih di bawah standar dan sering terjadi PHK sepihak, masalah lain yang dihadapi adalah adanya urbanisasi penduduk pedesaan

ke kota untuk mencari pekerjaan.

f. Sosial Budaya

Pengaruh latar belakang sosial budaya dan suku-suku bangsa yang berdiam di Sulawesi Tengah dapat membawa dampak negatif maupun positif, oleh karena masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga adat kebiasaannya berbeda/heterogen serta bertemperamen tinggi memiliki rasa fanatisme kedaerahan, gemar minum-minuman keras dan menganut pola hidup konsumtif dengan demikian merupakan salah satu faktor timbulnya gangguan kamtibmas seperti pembunuhan, perkelahian antar suku dll.

Kultur budaya minum-minuman keras yang diproduksi secara tradisional merupakan kultur yang sulit dirubah, karena disamping pembuatannya sangat sederhana, bahannya mudah diperoleh, dan laku dijual dengan harga terjangkau.

Dengan demikian kendala ini dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. 'Tarian Dero', budaya asli daerah Poso, oleh pihak tertentu dianggap bertentangan dengan faham yang dianut, karena dianggap bukan muhrimnya.

Adat istiadat di daerah ini umumnya telah dipengaruhi oleh adanya agama Islam dan Kristen, namun pada daerah pedalaman masih menganut kepercayaan kepada dewa, mahluk halus, kekuatan gaib dan kekuatan sakti. Oleh karena adanya kepercayaan ini sehingga sebagian besar masyarakat masih menganut pantangan-pantangan seperti membuang ampas kelapa pada waktu sore/malam hari, membakar terong, udang dan membawa beras hitam/merah pada waktu perjalanan jauh/

LENSA RISET



Pos-pos perbatasan RI - PNG Jayapura



KabagJianbang saat meninjau lokasi pasca tsunami Aceh



Peserta Rakernas LITBANG



Pospol perbatasan Entikong Res - Sanggau - Kalbar.

di laut.

Pada masyarakat tertentu masih terlihat kasta pada perkawinan, kematian dan kelahiran seperti Watinu Maradika (keturunan raja/bangsawan), Wati Oge (pimpinan yang mempunyai kedudukan), Wati Nto-deo (masyarakat biasa/kaya) dan Wati Hantongo (budak belian).

Adanya kepercayaan sebagian masyarakat bahwa mereka bersumber dari Tomanurung (orang dari Kayangan) yang turun melalui bambu kuning, daun tawako, pohon bonati, ikan tingaru dan batu.

Suku bangsa asli adalah :

- Suku Buol - Suku Lore
- Suku Toli-toli - Suku Mori
- Suku Kaili - Suku Sigi
- Suku Pakaw - Suku Kulawi
- Suku Koro - Suku Pamona
- Suku Towana - Suku Bungku
- Suku Ampana - Suku Saluan
- Suku Loinang - Suku Pabongko
- Suku Balantak - Suku Banggai

Suku bangsa dari daerah luar :

- Suku Jawa - Suku Batak
- Suku Sangir - Suku Minahasa
- Suku Makassar - Suku Bugis
- Suku Cina - Suku Mandar
- Suku Toraja - Dan lain-lain

Bahasa:

- a) Bahasa Kaili
- b) Bahasa Tomini
- c) Bahasa Pamona
- d) Bahasa Mori
- e) Bahasa Toli-toli
- f) Bahasa Buol
- g) Bahasa Saluan
- h) Bahasa Balantak
- i) Bahasa Banggai
- j) Bahasa Ampana
- k) Bahasa Bungku

l) Bahasa Bajo

Disamping bahasa-bahasa daerah tersebut diatas, juga terdapat bahasa-bahasa daerah yang kecil seperti:

- a) Bahasa Tara
- b) Bahasa Ledo
- c) Bahasa Iga
- d) Bahasa Rai
- e) Bahasa Ado
- f) Bahasa Nude dll

Di dalam komunikasi/pergaulan sehari-hari masyarakat Sulawesi Tengah menggunakan bahasa Indonesia.

Toleransi antar umat beragama di daerah Sulawesi Tengah saat ini cukup baik, secara keseluruhan umat beragama di daerah ini diperinci berdasarkan prosentasenya adalah sebagai berikut :

- a) Agama Islam sebanyak 75% tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah terkecuali Kabupaten Poso hanya sebagian kecil.
- b) Agama Kristen Protestan sebanyak 20,9% terbanyak berdiam di Kabupaten Poso.
- c) Agama Katholik sebanyak 1,06% terbanyak di Kota Poso.
- d) Agama Hindu sebanyak 1,5% sebagian besar dianut oleh masyarakat transmigrasi asal Bali.
- e) Agama Budha sebanyak 0,64% sebagian besar dianut oleh masyarakat pendatang dan orang Cina.
- f) Animisme sebanyak 0,5% dianut oleh masyarakat terasing yang mendiami daerah pedalaman dan pegunungan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan serta keterbatasan biaya orang tua murid menyebabkan terjadinya siswa dan mahasiswa drop out/putus sekolah. Kerawanan-ke-

rawanan yang timbul adalah demonstrasi, perkelahian, pencurian dan kenakalan remaja. Kerawanan lain yang dapat terjadi adalah murid yang tidak mentaati aturan-aturan sekolah terutama bagi yang merasa tidak ditertibkan maka akan menimbulkan ketegangan antar murid dan guru serta sering terjadi perkelahian antar pelajar.

Permasalahan ini disamping membawa pengaruh positif terhadap perekonomian daerah dan pemerataan penduduk juga membawa dampak negatif oleh karena masih banyak kendala yang dihadapi seperti adanya lahan kurang produktif, jatah hidup telah selesai sedangkan lahan yang diagarap belum menghasilkan, sulitnya transportasi untuk pemasaran hasil dan lain-lain, sehingga banyak warga trans yang meninggalkan lahannya untuk mencari pekerjaan di kota. Disamping itu juga sering terjadi pertentangan antar sesama warga transmigran, antar warga transmigran dengan masyarakat setempat oleh karena perbedaan adat istiadat dan masalah lahan yang digunakan oleh warga transmigrasi sebelumnya telah digarap oleh penduduk setempat.

Pengembangan proyek kepariwisataan di daerah terus ditingkatkan baik fisik maupun non fisik. Namun demikian masalah ini juga membawa pengaruh negatif seperti halnya masuknya kebudayaan baru, ideologi baru, kejahatan dengan modus operandi baru, pencurian, penyusupan, infiltrasi, beredarnya obat-obat terlarang, narkotika, meningkatnya pelanggaran susila dan lain-lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Pertentangan-pertentangan yang dapat menjurus ke SARA di daerah

Sulawesi Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Fanatisme kedaerahan/kesukuan yang sempit merupakan salah satu faktor terjadinya kasus perkelahian antar kelompok atau perkelahian antar suku, untuk itu dalam mencegah terjadinya kasus ini perlu ditingkatkan ceramah untuk meningkatkan wawasan kebangsaan.
- b) Timbulnya realisasi terutama pada masyarakat WNI keturunan Cina dan WNA Cina penduduk hal ini disebabkan oleh karena kegiatan ekonomi/perdagangan di tempat-tempat strategis masih di dominasi oleh WNI keturunan Cina dan adanya tanggapan dari sebagian masyarakat dimana aparaturnya Pemerintah sering memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan bagi masyarakat WNI keturunan Cina sehingga dapat menimbulkan perasaan cemburu dan sentimen.
- c) Pada umumnya pelaksanaan agama di daerah Sulawesi Tengah tidak terdapat masalah yang berarti.
- g. Pertahanan dan Keamanan
 - 1) Masalah Lintas Batas
 - a) Masalah Pilipina yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah, merupakan ancaman oleh karena saat ini Pilipina sedang menghadapi pemberontakan dalam negerinya sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran lintas batas yang dilakukan pasukan pemberontak yang melarikan diri.
 - b) Di daerah Sulawesi Tengah

telah beberapa kali pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh nelayan Filipina yang disebabkan oleh faktor alam seperti angin besar, ombak besar, kerusakan mesin perahu dan lain-lain yang menyebabkan mereka terdampar. Daerah rawan pelanggaran lintas batas adalah sepanjang daerah pantai barat (Kabupaten Donggala dan Buol Toli-toli).

- 2) Masalah Integrasi TNI dan Polri
Masalah integrasi TNI/Polri di daerah Sulteng cukup baik, meskipun masih sering diwarnai bentrok fisik antara sesama anggota TNI/Polri yang berpangkat Bintara dan Tamtama terutama yang berusia remaja. Hal tersebut diakibatkan oleh masalah sepele dan akibat pengaruh minuman serta akibat rasa esprit de korps yang sempit. Khusus bagi anggota TNI/Polri yang terlibat dalam kasus pidana atau perdata dan pelanggaran susila perlu dikenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaranannya agar menjadi perhatian bagi anggota lain yang belum pernah melakukan dan dapat menimbulkan efek jera.
- 3) Masalah Orang Asing
Kasus yang terjadi menyangkut orang asing pendatang adalah penyalahgunaan dokumen atau over stay yang mana disebabkan para nelayan yang terdampar dengan alasan kehabisan bahan bakar dan akibat terjadinya badai topan. Mengingat daerah Sulteng berbatasan dengan negara Filipina dan Tawao Malay-

sia sehingga perlu diwaspadai dan tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang rawan munculnya tindak pidana yang dilakukan orang asing.

4) Masalah Kamtibmas

Ada segelintir orang yang masih memiliki senjata api dan bahan peledak. Untuk itu perlu secara intensif melakukan sweeping senjata api dan bahan peledak. Diharapkan bantuan dan perani Operasi Brimob, unsur Intel dan Reserse Mabes Polri demi mempersempit ruang gerak pelaku.

6. Fakta-Fakta Pemicu Kekerasan Di Poso

a. Kronologis Pemicu Konflik

TRAGEDI POSO I (Ramadhan 1419/24-25 Desember 1998)

Pemicunya sebagaimana banyak diulas di media adalah MIRAS (minuman keras). Sekelompok pemuda nasrani membuat ulah dengan sengaja minum dan membuat keributan saat Sholat Tarawih digelar. Beberapa pengurus masjid mencoba mengingatkan. Usahanya berhasil. Para pemuda nasrani pergi meninggalkan area masjid.

Namun persoalan tidak berhenti di sini. Lewat tengah malam kelompok pemuda itu kembali. Salah seorang pengurus masjid yang memperingatkan mereka untuk tidak mabuk-mabukan dikejar oleh seorang pemuda Kristen bernama Roy Runtu Basalambah yang sedang mabuk pada tengah malam saat ia membangunkan warga Muslim di Kelurahan Sayo untuk melakukan sahur. Sang pemuda muslim (Ahmad Ridwan) melarikan

diri ke sebuah masjid (dekat pesantren), namun di tempat itu pula ia dipotong (tak jelas bagian tubuh mana yang dipotong).

Pemuda muslim itu sempat berteriak minta tolong dan lari dengan meninggalkan percikan darah di plafon masjid.

Setelah kejadian itu, masyarakat muslim Poso yang mendengar berita ini segera berkumpul. Konsentrasi massa pada akhirnya bergerak menghancurkan setiap kedai/toko yang menjual miras. Masyarakat muslim meminta pemuda yang melakukan penganiayaan agar menyerahkan diri. Dan menuntut aparat untuk segera menangkap pelakunya. Salah satu pemuda nasrani dicurigai mencari bantuan ke Tentena, Desa Sepe dan Silanca.

Herman Parimo, tokoh nasrani Tentena membawa massa bergerak ke Poso. Mereka sempat membakar Pasar sentral Poso dan mengadakan pawai keliling Poso, menunjukkan kemenangannya.

Kabar Poso sudah diduduki massa Tentena terdengar di Parigi dan Ampapa (basis massa muslim). Dengan koordinasi ustadznya masing-masing bergeraklah massa kedua kota itu ke Poso. Poso kembali dalam kendali umat Islam. Dua pasukan, muslim dan nasrani masih menggunakan alat tempur sederhana, parang dan batu, meski beberapa sniper terbukti telah melukai beberapa orang muslim.

Peristiwa ini terjadi saat suhu politik di Kab. Poso sedang panas. Suksesi Bupati sedang dalam perbincangan. Kandidat yang muncul, Bupati lama Arif Patanga (Muslim) bersaing dengan Sekwildanya Yahya Patiro (Kristen).

Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku politik. Muncul tuntutan-tuntutan masyarakat agar Yahya Patiro dimintai keterangannya oleh aparat akibat dicurigai terlibat dalam pengerahan massa Tentena.

Alih-alih dimintai keterangan. Yahya justru mendapat bonus dari gubernur. Naik menjadi asisten Sekwilda Tk. I Sulteng.

Babak ini berakhir dengan adilinya Herman Parimo (sudah meninggal di penjara) dan Akfar Patanga (Muslim, adik Arif Patanga) sebagai provokator. Tampaklah di sini pemerintah menerapkan fifty-fifty law untuk meredakan kedua belah pihak.

Kemenangan boleh dikata ada di pihak muslim.

TRAGEDI POSO II

16 April 2000

Dedy seorang pemuda dari desa Kayamanya (suku Gorontalo) tengah mengendarai sepeda motor Crystal pada malam hari tiba-tiba dihadang (disuruh berhenti) sekelompok pemuda Kristen yang mabuk di Desa Lombogia. Dedy sempat melarikan diri dengan sepeda motornya namun terjatuh sehingga tubuhnya mengalami luka-luka. Setelah diperban, kemudian Dedy melaporkan pada teman-temannya di desa Kayamanya, bahwa ia dipotong oleh pemuda kristen Lombogia.

17 April 2000

Warga muslim Kayamanya (± 20 orang beserta aparat) mendatangi Kelurahan Lombogia untuk mencari oknum pelakunya namun disambut dengan serbuan panah/

peluncur dari warga Lombogia.

Dan pada malamnya, warga Kayamanya membakar Desa Lombogia ± 127 rumah serta 2 bangunan gereja, SD, SMP, SMA Kristen hangus terbakar.

Selain itu gedung Bayangkari dan sebagian asrama Polres juga ikut terbakar. Akibat peristiwa itu, terjadi pengungsian ke Madale, Kapompa, Lage, Pamona Utara, Bukit Bambu, Kodim/Kompi dan wilayah Poso Pesisir.

Dalam peristiwa ini 3 orang meninggal yaitu Husni (23 tahun) warga Bonesompe, Yanto (13 tahun) warga kayamanya, keduanya dari kelompok Islam serta seorang Rozal Machmud yang terluka kemudian meninggal.

18 April 2000

Pembakaran rumah kembali terjadi di Lombogia bahkan menyebar ke Kasintuwu. Gereja Advent Kasintuwu dan Gereja Sidang jemaat Allah di jalan Gatot Subroto menjadi sasaran pelemparan. Gubernur Sulawesi tengah, Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako datang ke kota Poso untuk ikut berupaya meredakan ketegangan.

19 April 2000

Ditemukan mayat Muslim (Ula, 25 tahun) dibantai di Jalan Maramis kelurahan Lambogia, dengan luka bacokan dan leher tertusuk panah. Kemudian warga muslim terpancing emosi dan bergerak kembali membakar gereja Advent dan sebuah gereja besar dekat terminal, gedung serba guna, SD, SMP dan SMA Kristen.

Warga kristen mengungsi ke

kelurahan Pamona Utara (Tentena) dan Tagolu yang merupakan basis Kristen.

Setelah kejadian tersebut, umat Islam di Kelurahan Kowua bersiaga penuh mengantisipasi serangan balasan. Seorang muallaf bernama Nicodemus yang kebetulan bekerja di Tentena ditugaskan untuk memantau perkembangan warga Kristen di Tentena.

Setelah 2 minggu kemudian, Nico kembali ke Poso karena merasa dirinya sedang diintai. Namun dari situ muncul kesepakatan untuk menginformasikan melalui kata Sandi : Kalau "Pak Nasir (Nashara) datang berobat lanjut ke Poso" berarti 99% akan ada penyerangan kaum Nasrani.

20 April 2000

Masih terjadi pengrusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk serta gereja di Bukit Bambu.

22 April 2000

Pangdam Wirabuana Mayjen Slamet Kirbiantoro datang di kota Poso dalam rangka melakukan tindakan pengamanan. Sejak saat itu keadaan Kota Poso telah menjadi aman.

TRAGEDI POSO III

16 Mei 2000

Seorang warga muslim dari Taripa telah dibunuh. Berkembang isu ada rencana pembunuhan terhadap kepala BPP Kecamatan Pamona Utara beserta keluarganya.

19 Mei 2000

Massa Kristen melakukan penghadangan terhadap kendaraan umum

yang lewat di Taripa. Namun aparat keamanan cepat bertindak membubarkan penghadangan tersebut. Pada hari itu juga terjadi pengungsian warga Kristen dari Kota Poso ke daerah Kristen.

22 Mei 2000

Pak Maro (muallaf) dari Kelurahan Lawanga, yang disusupkan di Kelurahan Kelei, datang ke kediaman Ust. Abdul Gani menyampaikan akan ada penyerbuan pada subuh hari. Pak Maro menyamar dengan memakai kalung salib dan mentato tubuhnya. Disinyalir, di Kelei yang merupakan basis kristen pernah diadakan latihan militer.

Jam 17.30 sore ada interlokal dari Nico di Tentena ke rumah pak Abdul Gani memberitakan bahwa "Pak Nasir (Nashara) akan berkunjung untu berobat ke Poso malam ini atau besok." Jam 19.00 malam, seorang pemuda bernama Heri Alfianto yang juga ketua Remaja Masjid Kowua memberikan informasi bahwa di rumahnya yang kebetulan terdapat TUT (Telepon Umum Tunggu), ada seorang Nashrani yang diduga ingin menggunakan jasa telepon bercerita kepadanya bahwa pada jam 2 malam/dini hari akan ada penyerangan dari masyarakat Flores (Kristen). Heri ini dilihat dari raut mukanya mirip orang Kristen karena ibunya berasal dari Manado yang muallaf, sehingga orang nashrani itu mengira Heri juga orang Kristen.

Penyerangan dilakukan per kelompok kecil dengan sasaran KBL (Kayamanya, Bonesompe, Lawanga) dan menculik tokoh-tokoh Islam Poso, antara lain : Haji Nani, Ust. Adnan Arsal, dll. Pada malam itu

juga dikumpulkan para tokoh yang tergabung dalam "Forum Perjuangan Umat Islam" yang terbentuk sejak kerusuhan Poso jilid I di rumah Bpk. Adnan Arsal dan langsung mengkoordinasikan pembagian tugas penjagaan di pos-pos yang telah ditentukan. Pertemuan itu selesai jam 21.30. Pada malam itu sudah tersebar isu penyerangan terutama di Kecamatan Poso Pesisir, sehingga setiap warga, baik Islam dan Kristen, berjaga-jaga mengamankan diri.

Pada jam 24.00 turun rombongan Muspida beserta Ketua DPRD Tk.II, Akram Kamarudin, bermaksud menenangkan warga. Memberitahukan kepada warga Poso bahwa berdasarkan informasi Kapolsek Pamona Utara, Ramil Pamona Utara dan Camat Pamona Utara isu penyerangan itu tidak benar dan menyebarkan. Akhirnya warga yang tadinya berjaga di pos-pos bubar dan kembali ke rumah, kecuali warga di Kelurahan Kowua. Bahkan pemuda Kowua membantah berita dari Muspida tersebut karena yakin dengan info dari Nico di Tentena.

Setelah itu muncul tanda bahaya berupa kentongan pada tiang listrik dari desa seberang sungai, tepatnya di PDAM, Kelurahan Gebang Rejo. Kemudian dikonfirmasi melalui telepon ke Pak Adnan Arsal, namun dijawab bahwa sampai saat ini belum ada tanda pengerahan massa yang melewati Desa Gebang Rejo.

Tak berapa lama, Pak Adnan Arsal memberitakan memang ada penyerangan dilakukan hanya oleh sekelompok kecil orang (8 orang) berpakaian ninja, sehingga tidak terlihat ada penyerangan secara besar-besaran. Kelompok ninja tersebut

membawa sandera yakni Pak Alwi (pegawai BNI) dan dibawa ke Desa Kayamanya dengan tujuan mencari Haji Nani Lamusu.

Dari pihak Polres, yakni Serma Kamaruddin Ali (47) yang ingin menyelamatkan sandera dan mencoba bernegosiasi, berkata: "Saya ini polisi," sambil mencabut pistol. Namun Pak Kamarudin keburu tewas di tempat dibacok kelompok ninja itu. Sedang sandernya selamat dan melarikan diri. Mereka berhasil membakar rumah Haji Nani. Mereka terus maju ke desa Moengko Baru, di situ didapati seorang mantan lurah, Pak Syukur yang ingin memukul tiang listrik tanda bahaya, dibacok hingga tewas.

23 Mei 2000

Penyerangan orang Kristen itu dibagi tiga kelompok kecil yang memasuki daerah Ranolincu, Kel. Sayo dan Gebang Rejo.

Di Kelurahan Gebang Rejo, penyerang Kristen dikejar warga muslim dan melarikan diri ke Kompleks Sekolah Katolik Santo Theresia (Moengko baru) dan bersembunyi di Gereja dalam kompleks sekolah itu. Pimpinan kelompok Flores itu, Pak Tibo yang sebenarnya warga Gebang Rejo (Pensiunan ABRI) bernegosiasi dengan aparat keamanan yang menahan kejaran warga muslim bahwa kelompoknya akan menyerahkan diri dengan jaminan tidak diapa-apakan.

Akhirnya dua orang anggotanya keluar dari persembunyian dan menuju ke aparat, namun warga muslim yang tidak dapat menahan emosi akhirnya mengeroyok kedua orang itu.

24 Mei 2000

Warga muslim yang menerima kabar bersembunyinya kelompok Flores di kompleks Santo Theresia itu langsung membakar kompleks tersebut.

26 Mei 2000

Diterima kabar dari Tentena bahwa "Pak Nasir turun berobat terus," yang berarti telah ada pengurangan massa, konsentrasi massa di Togoli. Umat Islam berjaga-jaga di Kururungkoa.

29 Mei 2000

Beredar isu bahwa penyerang (Kristen) akan memasuki dan menguasai Kota Poso, kemudian warga muslim dalam Kota Poso mengadakan perlawanan, satuan Brimob dan TNI dari Korem 7 Wirabuna melakukan siaga penuh di Kota Poso.

Beredar isu bahwa pada hari Paskah Isa Al-Masih, ribuan massa akan kembali menyerang kota Poso dan akan membumi-hanguskannya. Jalan-jalan menuju Kota Poso diblokade oleh warga Kristen. Arus lalu lintas macet total dan bantuan massa serta logistik dari luar kota Poso tidak dapat masuk.

Massa Muslim mengungsi melalui laut ke Parigi dan ke Ampana. Sebuah mobil Ambulance dicegat massa Muslim di Desa Palawa Parigi yang disinyalir membawa senjata untuk massa Kristen di Kota Poso.

31 Mei 2000

Kerusuhan merembet keluar Kota Poso setidaknya 8 orang tewas dan ribuan orang luka-luka. Aksi bentrok itu terjadi sejak Sabtu pekan lalu di Desa Sepe, Batugincu, Silangka dan

Toyado. Diduga kuat mereka yang tewas terkena senjata api. Di desa Saninora Poso Pesisir, aksi pembakaran rumah-rumah Muslim dilakukan oleh massa Kristen. Aksi serupa juga terjadi di desa Toini Ladangan, massa dari dua desa tersebut menggunakan senjata rakitan untuk menyerang Kelurahan Sayo.

1 Juni 2000

Ketua DPD PK Poso beserta Ust. Abdul Gani berkunjung ke Parigi, KH. Saleh Damar untuk berkonsultasi sekaligus meminta bantuan. Keduanya menginap semalam. Setelah itu menerima telepon dari Habib Saleh Al-Idrus bahwa ada penyerangan dari Napu (Nasrani) hari Minggu.

2 Juni 2000

Keduanya akhirnya kembali ke Poso. Di tengah jalan bertemu dengan para pengungsi yang mengabarkan bahwa Napu sudah turun (menyerang) dan mengurung kota Poso dengan cara memblokade jalur darat dengan menutup badan jalan dengan gelondongan kayu serta menghancurkan jembatan yang menghubungkan ke Kota Palu. Ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 5.000 orang. Dikabarkan pula, mereka telah sampai di Tabalu dan menyandera 1 orang.

Para Nasrani itu juga membakar desa-desa di sekitarnya yang dilewati. Sampai di Tokorondo, keduanya berpisah, Ketua DPD Poso kembali ke KH. Saleh Damar untuk meminta bantuan pasukan segera.

Kemudian bertemu lagi di Tokorondo dengan bala bantuan pasukan 5 truk dan 1 kijang pick up.

Pasukan dengan senjata tradi-

sional (parang) akhirnya berangkat. sampai ke Desa Masani. Begitu sampai di Desa Kinidapa, rombongan disergap pasukan Nasrani yang bersenjata lengkap. Melihat ada beberapa anggota pasukan yang tertembak, anggota lainnya akhirnya kocar-kacir, dan pasukan muslim semakin terdesak, bahkan salah seorang korban muslim asal temate ada yang dicincang.

Ust. Abdul Gani dkk menyelamatkan diri berlari hingga ke pinggir pantai. Alhamdulillah, mereka bertemu perahu motor dari Kayamanya utusan Habib Saleh Al-Idrus.

Menurut pantauan nara sumber beserta temannya yang bersembunyi di Kowua, di situ ada rumah tertentu tempat penampungan massa kristen yang habis menyerang.

Di Kelurahan Lembumawo, dibuat kesepakatan antar warga muslim dan kristen untuk menjaga daerah mereka dari kerusuhan. Namun setelah desa itu dikuasai oleh non muslim, warga muslim dikumpulkan di masjid jam 1 siang. Setelah itu dipanggil beberapa orang dan tidak kembali lagi.

Jam 5 sore dipanggil dengan suatu alasan, dan tidak kembali lagi. Diduga kuat orang yang telah dipanggil itu telah dibunuh. Namun ada seseorang (usia 32 tahun) yang menyelamatkan diri dengan menghanyutkan diri ke sungai dan akhirnya sampai di rumah Ust. Abdul Gani kemudian melaporkan hal ini.

Di Kelurahan Situlemba, Kilometer 9, sempat dikabarkan kepada aparat bahwa ada warga muslim yang disandera. Namun pihak aparat tidak percaya. Baru setelah banyak mayat yang hanyut disungai, mereka

membuka mata. Wanita-wanitanya disuruh memasak untuk keperluan orang kristen (penyandera) dalam keadaan *-maaf-* telanjang. Kabar ini diterima dari anak Pak Imam desa Situlemba bernama Rohima yang menyelamatkan diri lewat sungai.

3 Juni 2000

Ribuan pengungsi Muslim ditampung di tempat darurat antara lain, Mess Pemda Tk. II Poso, di Kota Parigi, di Kota Ampana dan di perguruan Al-Khairat Palu serta pondok pesantren dan Masjid yang ada di Kota Palu dan Parigi. Massa Kristen telah menguasai kota Poso dan Poso Pesisir dan terus melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah yang ditinggalkan oleh penduduk.

Akhir Agustus 2000

TNI kondisi relatif lebih aman. TNI menempatkan pasukannya di setiap kelurahan dan desa sebanyak satu regu dan mengharapkan andil masyarakat setempat untuk bisa bersama-sama menjaga dan menertibkan wilayahnya masing-masing, serta tetap menjaga ketertiban.

TNI berupaya semaksimal mungkin menjaga dan mengamankan kota Poso dari segala macam ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam kota Poso sendiri. Hal ini diucapkan DANDIM 1307 Tadulako Poso saat acara silaturahmi antara tokoh pemuda-pemudi se wilayah Poso di balai sidang DPRD Tk II Poso.

Dandim selalu siap membantu segala bentuk kesulitan para pemuda/i di Kabupaten Poso. Hadir dalam silaturahmi tersebut diantaranya ialah wakil ketua DPRD serta be-

berapa anggota DPRD serta tokoh-tokoh pemuda yang ada di Kab. Poso. Upaya silaturahmi yang dilaksanakan oleh Kodim 1307 ini bertujuan untuk merealisasikan serta mencermati kunjung presiden RI di Kab. Poso pada tanggal 22 Agustus 2000 dalam rangka menghadiri acara kesepakatan bersama para tokoh adat dan masyarakat.

Dalam rangka silaturahmi ini juga, Dandim yang akrab dipanggil pak Dede ini menyampaikan bahwa anggotanya bersama POLRI menyita 20 dus minuman keras yang diperdagangkan oleh masyarakat. Dandim mengajak kepada seluruh komponen pemuda untuk sama-sama menghindari miras dan narkoba yang bisa merugikan dan menyengsarakan masyarakat.

Kondisi pengungsi yang masih sangat membutuhkan pengayoman dan bantuan masih berada di camp pengungsi. Data akhir yang dihimpun PKPU Poso adalah : pengungsi yang berada di Poso kota berjumlah 560 KK (1,816 jiwa), Poso pesisir 120 kk (459 jiwa), Kec. Tojo 139 kk (646 jiwa), Kec. Lage 134 kk (624 jiwa), Kec. Ampana 1.109 kk (4,712 jiwa), sehingga total pengungsi yang masih berada ditempat pengungsian sampai saat itu 2.062 kk (8267 jiwa). Mereka adalah masyarakat yang sudah tidak mempunyai rumah dan tempat untuk bekerja, selain hanya mengharapkan bantuan dari lembaga sosial masyarakat. Massa Kelompok Merah Masih Ada. Dengan ditangkapihnya panglima perang kelompok merah Febianus Tibo, bukan membuat surut semangat para anggota kelompok merah yang tersisa.

Hal ini dikuatkan dengan kete-

rangan yang didapat dari seorang ibu yang seorang staf pengajar disalah satu Sekolah Dasar di desa Pendolo kecamatan Pamona selatan. Ia menuturkan kalau dirinya yang muallaf (baru memeluk Islam) karena mengikuti suami, dipaksa oleh kelompok merah untuk kembali memeluk agama yang dulu dianutnya yaitu kristen. Merasa dipaksa terus, akhirnya ia memilih untuk meloloskan diri meninggalkan Pendolo. Disaat sang ibu ingin meloloskan diri dan bermaksud ke Poso itulah ibu tersebut mendengar dari mulut orang-orang kelompok merah bahwa konsentrasi massa kelompok merah masih ada dan tidak lagi di desa Kelei, tetapi di desa Bo'e, yang dimaksud adalah suatu daerah yang mayoritas beragama kristen dan mayoritas suku Pamona. Menurutnya, di desa ini kelompok merah mengadakan latihan dan menyiapkan pasukannya. Saat dikonfirmasi sang ibu meminta supaya namanya dirahasiakan.

22 Agustus 2000

Gubernur Sulawesi Tengah HB. Paliudju masih menambahkan, kalau Poso sudah dibantu oleh tiga propinsi yaitu Sulsel, Sulut dan Sultra. Bantuan dan upaya tersebut merupakan suatu realisasi dan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan oleh empat gubernur yang merupakan kerjasama ekonomi regional se wilayah Sulawesi dengan tetap mengedepankan persatuan dalam Negara Republik Indonesia. Pendekatan kultural merupakan jalan penyelesaian masalah yang berdasarkan adat lokal yang pada hari ni di aktualisasikan dengan upacara adat RUJU SINTU-

WU MAROSO untuk mencapai perdamaian Tanbu tana.

Prosesi adat Tanbu tana ini pada prinsipnya berperan meletakkan dasar kultural yang kuat demi tegaknya perdamaian bagi pihak-pihak yang betikai.

Seusai gubernur memberikan sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan kesepakatan adat Sintuwu Maroso Yanti T dalam bahasa Pamona yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh A. Tabando selaku ketua adat Poso yang bunyinya :

1. Mendukung upaya Rujuk Sintuwu Maroso yang dilaksanakan di Kab. Poso, Sulawesi Tengah.
2. Seluruh masyarakat kab. Poso ikut bertanggungjawab untuk menciptakan kedamaian atas dasar persaudaraan kekeluargaan demi kepentingan bangsa dan negara.
3. Tetap menjadikan Sintuwu maroso sebagai ikatan moral tanda persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan dari seluruh rakyat kab. Poso dan kesepakatan ini adalah merupakan awal dari upaya menuju rujuk sintuwu maroso yang dikuatkan dengan upacara adat.
4. Mendukung upaya penegakan supremasi hukum dalam menyelesaikan kerusuhan yang telah terjadi di Kab. Poso dan terhadap oknum-oknum yang secara nyata terlibat melakukan tindak pidana agar tetap dilakukan proses hukum demi tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat.
5. Apabila kesepakatan ini telah ditandatangani bersama, kemu-

dian terjadi lagi kerusuhan oleh kelompok manapun, maka kelompok tersebut akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesepakatan ini kemudian ditandatangani oleh masing-masing ketua adat, diantara yang menandatangani ialah: A. Tabande, Pdt. ST. Pandayu, Abd. Rauf, Jamiun, T.Taiya, Tangkali sipu. H. Sofyan Abdullah dll, yang notabene tidak punya keterkaitan langsung dengan masalah Poso.

Setelah usai pembacaan kesepakatan adat, Kepala Negara RI KH. Abdurahman Wahid menyampaikan amanatnya di depan para tetua adat dan segenap tokoh dan pemerintah yang antara lain ialah: Menyambut baik kesepakatan adat yang telah dibacakan serta berharap agar masyarakat Poso yang majemuk dengan segala ragam adat istiadat dapat menyelesaikan persoalannya sendiri dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Sementara ditempat lain, wawancara yang berlangsung dengan menteri agama bapak KH Tolchah Hasan, mengatakan bahwa salah satu diantara yang kerap kali mempermudah terjadinya konflik yang bernuansa sara ialah, apabila antara kelompok atas dan kelompok bawah intensitas hubungannya kurang harmonis, sehingga apa yang diputuskan kerap kali tidak diterapkan ditingkat bawah. Beliau menambahkan bahwa : paling tidak ada satu bagian yang sudah dapat kita peroleh dari peristiwa ini, yakni

adanya kemauan ingin tampil bersama-sama merubah suasana menjadi seperti semula.

Masih dengan pak menteri, ditanya kenapa persoalan agama diselesaikan secara adat, beliau menjawab, saya tidak melihat ke arah itu tetapi yang ada ialah ada bagian yang selalu memanfaatkan agama sebagai pemicu yang pada gilirannya merugikan semua komponen.

Sesuai upacara adat masih banyak masyarakat Poso yang mempertanyakan akankah kedamaian ini bisa terealisasi? Karena saat pembacaan naskah sintuwu maroso masyarakat yang berada diluar berteriak tanda tidak setuju atas dibacanya naskah tersebut oleh sebagian besar masyarakat.

Sementara masih di tempat yang sama, masyarakat Kristen yang akan pulang ke Tentena juga mendapat teriakan dan makian dari masyarakat Muslim kota Poso.

Adakah tanda-tanda kedamaian dari masyarakat yang bertikai? Yang merasakan langsung akibat dari kebiadaban satu golongan dalam kerusuhan tidak dihadirkan? Sementara yang banyak mengambil bagian dalam dari upacara itu hanya orang-orang yang beradat Poso (kelompok Kristen) pertanyaan ini muncul dari mulut-mulut masyarakat yang masih merasakan penderitaan akibat kerusuhan tersebut.

Mudah-mudahan saja kedatangan bapak Gus Dur tidak sia-sia dan bisa membawa nuansa kedamaian hakiki di tanah Poso.

September 2000

Upaya maksimal yang dilakukan tim evakuasi, ditemukan lima ke-

rangka mayat. Kelima mayat yang dimaksud sudah tinggal tengkorak dan tidak dapat lagi diketahui identitasnya. Dari kelima mayat tersebut di duga ada seorang wanita, hal ini dikuatkan dengan pakaian yang digunakannya. Terlihat pakainya berupa rompi dan jilbab yang keseluruhannya bertuliskan huruf arab.

Perjalanan untuk menelusuri letak mayat yang dimaksud dari kota Tentena berjarak kurang lebih 50 km. Pencarian yang langsung dipimpin Kapolres Poso ini memang hal yang paling sulit kalau dikaitkan dengan pencarian sebelumnya. Hal ini terbukti dengan situasi medan pencarian yang demikian jauh yang terjal.

Tim berangkat dari Poso jam 07.00 dan tiba ditempat jam 11.30, dan langsung melakukan pencarian bersama dengan dua anjing pelacak masig-masing Wage dan Atek. Namun karena jurang terjal dengan kemiringan 80 derajat, maka kedua anjing pelacak harus beristirahat, sehingga tim harus menelusuri jurang dengan menggunakan tali Alpina. Setelah menembus dasar jurang yang berkedalaman 500 meter, yang menghubungkan dengan Danau Poso, tim harus kembali ke atas dengan lima kerangka. Di lokasi padang Marari ini, menurut sumber dari masyarakat banyak mayat muslim di buang.

Mungkin ada benarnya kalau masih ada mayat ditempat itu, namun karena tim merasa medannya cukup sulit, maka harus menghentikan pencariannya. Yang jelas dari hasil pengamatan selama dalam perjalanan dari KM 4 kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota sampai ke padang

Marari Kecamatan Pamona Selatan, tidak satupun rumah orang muslim yang tersisa, karena sudah dilalap si jago merah yang disulut oleh kelompok Merah saat kerusuhan berlangsung. Kini daerah Pamona dan sekitarnya tidak lagi dihuni oleh Ummat Islam dan bahkan mesjid-mesjid tidak lagi berfungsi. Setelah menelusuri perjalanan, maka team sampai kembali di Poso jam 17.45, dan mayat langsung dikuburkan dikuburan massal Kelurahan Lawanga Kabupaten Poso.

Masyarakat dan keluarga korban kerusuhan Poso dari desa Sintuwu Lemba (KM 9) mengadakan do'a bersama di mesjid desa Sintuwu Lemba. Acara ini berlangsung haru karena dihadiri oleh para janda dan keluarga korban yang datang dengan mengendarai 7 (tujuh) buah mobil. Acara ini dimulai dengan shalat magrib bersama, kemudian pembacaan ayat suci Al Qur'an beserta terjemahnya, dilanjutkan dengan do'a dan makan bersama. Acara ini berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari TNI dan POLRI. Tim PKPU yang turut hadir dalam acara ini memberi sumbangan kurma yang dimakan bersama.

Tragedi Poso yang menelan korban ratusan orang banyaknya, kini semakin nyata lagi dengan di temukan mayat-mayat manusia yang tak berdosa.

Minggu tanggal 10 september 2000 tim evakuasi yang di dampingi Kapolres Poso bersama jajaran BRIMOB DAN Dit sub satwa, berhasil menemukan sembilan belas kerangka mayat di Desa Padang Marari dan Desa Meko Kecamatan Pamona Selatan Kab. Poso. Tim

yang berangkat dari Poso jam 9.30 sampai di TKP jam 13.00. wita langsung mengadakan pencarian pada lokasi yang telah ditinjau sebelumnya oleh satuan BRIMOB yang bertugas di Pendolo.

Upaya pencarian tersebut akhirnya menemukan lubang pertama yang di dalamnya terdapat enam mayat yang tinggal tengkorak. Kedalaman lubang yang menjadi kuburan keenam mayat tersebut diperkirakan memiliki kedalaman 1,5 x 1,5 meter.

Mayat pada lubang pertama ini sudah membusuk dan hancur serta tidak dapat diidentifikasi, sementara pada lubang yang kedua yang masih berjarak kurang lebih 500 meter dari lubang pertama, juga ditemukan mayat yang masih utuh dalam lubang yang berdiameter 1x2 meter. Keempat mayat yang dimaksud ditumpuk dalam lubang tersebut dan kepalanya sudah putus. Setelah keempat mayat terangkat, nampak dalam tumpukan akhir empat kepala mayat tersebut. Diperkirakan mayat tersebut baru sebulan dibantai oleh orang-orang Kristen dan langsung dikuburkan dalam lubang tersebut, ungkap Kasat Bimas Polres Poso Letda Reko, di tengah-tengah kesibukan penggalian.

Hal ini juga dikuatkan dengan adanya tanda kalua mayat tersebut belum terkelupas kulitnya dan belum terlalu membusuk. Dan pada lubang ketiga yakni di desa Moko yang jaraknya dari Padang Mamari sekitar 1 km, juga ditemukan mayat yang berada dalam lubang berkedalaman 30 cm. Dalam pakaiannya terdapat identitas bernama Abdul Latif, warga desa Mako. Mayat tersebut kedua tangannya terikat dan lengan kannya sudah terpisah dari badan,

serta menggunakan celana panjang hitam dan baju kecoklatan, juga menggunakan sepatu bot warna ungu.

Masih di Padang Mamari juga ditemukan tulang-tulang manusia sisa pembakaran, dan menurut sumber bahwa tulang tersebut adalah tulang manusia dan berjumlah enam orang. Hal ini dikuatkan karena di tempat pembakaran tersebut ditemukan korek api, besi tiga buah, cincin akik dua buah, kaca mata dua buah.

Di tempat pembakaran yang satunya lagi juga ditemukan tulang manusia yang sudah dibakar. Diduga berjumlah satu orang.

Dan dalam perjalanan menuju ke Poso juga ditemukan tulang di pinggir jalan, tepatnya di desa Moko.

Tulang manusia ini kemudian dibawa dan dibungkus dalam kantong-an. Tim investigasi PKPU yang ikut dalam pencarian tersebut bersama tim lainnya kembali ke Poso pada jam 17.45 dan tiba di lokasi penguburan massal kelurahan Lawanga Kecamatan Poso kota, Kabupaten Poso pada pukul 20.30 dengan membawa mayat muslim sebanyak 19 orang. Usai penguburan pukul 10.30.

Jumlah mayat yang sudah dievakuasi dan dikuburkan secara layak di pekuburan massal yaitu 143 orang. Di tambah yang dikuburkan di kelurahan Gebang Rejo 9 orang, maka jumlah keseluruhan adalah 152 orang.

Kerusuhan Poso yang bernuansa SARA yang pecah pada bulan Mei 2000, sejak tanggal 18 September berangsur membaik. Menyusul upaya PEMDA Tk II Poso membangun kembali sarana dan prasarana guna mengaktifkan kembali roda pereko-

nomian dan pemerintahan di kota Poso. Hal ini dapat dilihat dengan upaya positif membangun barak pengungsi diberbagai lokasi yang dilanda kerusuhan.

Diantara desa yang sudah dibangun barak ialah desa Kalora, Tokorondo, Mapane, Toini, Tegalrejo, KM 9 dan lain-lain. Pembangunan barak pengungsi ini bertujuan agar para masyarakat yang berada dipelempangan bisa segera kembali ke desanya dan dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa.

Bupati Poso Drs. Muin Pusadan mengatakan bahwa dirinya sangat mengharapkan masyarakat Poso yang trauma dengan kerusuhan Poso bisa kembali lagi ke Poso.

Aktifitas masyarakat yang berada di Kota Poso sudah mulai terlihat. Pasar serta pedagang-pedagang kecil mulai aktif melakukan kegiatan/penjualan.

18 September 2000 pukul 08.00 pagi, pasar sentral Poso sempat geger, karena seorang yang pernah melakukan pembakaran rumah penduduk muslim di Poso pesisir dikeroyok massa hingga babak belur. Korban yang dimaksud adalah seorang warga desa Ratolene yang secara kebetulan mampir ke pasar untuk berbelanja. Ketika sedang asyik berbelanja itulah massa menghampirinya, tanpa banyak tanya massa langsung memukul tersangka. Untunglah petugas POLRI langsung datang dan mengamankannya hingga nyawanya bisa tertolong. Kini tersangka tersebut berada di Mapolres Poso untuk dimintai keterangan. Sumber di POLRES Poso yang ditemui mengatakan bahwa orang tersebut memang berasal dari desa Ratulene dan salah satu anggota

kelompok yang ikut dalam pembakaran di Poso Pesisir.

19 September 2000

Sekitar jam 15.30 dua unit rumah penduduk kelurahan Lawanga hangus terbakar. Dua unit rumah dimaksud salah satunya adalah milik seorang wartawan FAKTA yang bernama Machmud Asri T. kedua rumah ini terbakar tanpa diketahui darimana sumber apinya.

Api tiba-tiba membesar dan melalap dua rumah sekaligus dan tak bisa diantisipasi lagi. Sekitar jam 18.30 mobil Panser yang datang dari Makassar mulai dipulangkan dengan menggunakan mobil truk pracetak.

Banyak masyarakat yang mulai was-was. Persoalannya, sebagian besar anggota TNI telah ditarik dan penjagaan mulai surut. Dan yang paling mengherankan, banyak warga Bugis yang selama ini berjualan di pasar sentral Poso sudah mulai mengungsi barang-barangnya dengan menggunakan mobil sendiri maupun mobil sewaan. Banyak yang bertanya-tanya; akankah keadaan kota Poso tetap aman kalau petugas-petugas keamanan telah kembali? banyak pengungsi yang meninggalkan kota Poso, mereka meninggalkan kota Poso karena merasa tidak aman setelah banyak petugas yang ditarik meninggalkan kota Poso.

27 September 2000

Kota Poso yang mulai aman sejak kerusuhan Mei 2000, kini mulai tegang kembali menyusul adanya isu yang berkembang dimasyarakat.

Informasi yang dihimpun tim investigasi PKPU Poso adalah ada-

nya isu yang beredar di masyarakat tentang adanya penyerangan yang akan dilakukan oleh kelompok merah dari Tentara secara besar-besaran. Dengan adanya isu ini masyarakat mulai meninggalkan kota Poso dengan membawa harta benda dan keluarga. Isu yang berkembang ialah bahwa penyerangan itu akan terjadi pada tanggal 28 September 2000. Isu ini merebak sejak tanggal 21 September 2000, manakala ada seorang warga yang bernama Daeng Parani pergi ke kebunnya di Kasih Guncu, dan bertemu dengan kelompok merah di kebunnya yang menodongkannya senjata Dum dum.

Ia berusaha lolos namun tembakan terkena kaki kirinya. Menyadari nyawanya terancam, maka ia melapor ke Polres Poso yang langsung mendatangi TKP namun tidak menemukan apa-apa.

Dengan berhembusnya isu ini banyak kalangan masyarakat yang resah. Polres Poso yang dihubungi mengatakan kalau itu cuma isu dan aparat tetap siap melindungi rakyat. Masyarakat tetap berharap semoga isu itu tidak benar.

Seorang tokoh agama di Poso mengatakan kalau memang benar dan kelompok merah mencoba menyerang kota Poso lagi, maka mereka akan mempertahankan kota Poso bersama umat Islam.

Disaat umat Islam hendak melaksanakan shalat 'Isya, dikagetkan dengan terbakarnya sebuah rumah milik seorang penduduk Kelurahan Gebang Rejo. Api yang tiba-tiba membesar tidak bisa dipadamkan oleh penduduk.

Menurut sumber di kelurahan, rumah yang terbakar itu adalah milik

Lukas yang kesehariannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Poso kota. Api yang tidak diketahui sumbernya itu hampir menalar ke rumah yang berada di sebelahnya. Beruntung masyarakat segera memadamkannya. Kejadian yang sempat menggegerkan masyarakat yang berada di Jl. Pulau Madura itu terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2000 pukul 19.15 wita.

29 September 2000

Sebuah rumah terbakar lagi, kali ini yang menjadi sasaran adalah rumah keluarga Amir Ringgit yang terletak di KM 4 Kelurahan Kawua Kecamatan Poso kota.

Api yang melalap rumah tersebut membesar pada pukul 22.30 wita, dan tidak dapat dipadamkan. Amir Ringgit yang telah meninggal 3 tahun yang lalu meninggalkan sebuah rumah yang sangat sederhana yang dihuni oleh istri bersama anak-anaknya, kini rumah tersebut telah musnah.

Disinyalir, yang melakukan pembakaran tersebut adalah kelompok merah, karena disekitar KM 4 tidak ada lagi masyarakat muslim yang tinggal, sebab 97% rumah muslim di daerah tersebut telah dibumihanguskan pada kerusuhan Mei 2000 lalu.

Terjadi lagi pembakaran di kelurahan Lawanga kecamatan Poso kota, yang menjadi sasaran pembakaran kali ini adalah rumah dinas RSU yang ditempati oleh tiga pegawai tetap Rumah Sakit tersebut. Api yang berkobar sekitar pukul 20.30 wita ini melalap tiga buah rumah sekaligus, yaitu rumah dr.

Jece, suster Tin dan suster Marwa.

Anggota Polri dan TNI yang datang ke tempat kejadian tidak bisa berbuat banyak karena kesulitan air untuk memadamkannya. Sebagai alternatif, aparat bersama masyarakat membongkar rumah dinas yang menghubungkan dengan kamar mayat dan rumah dinas lainnya.

Oktober 2000

Kondisi Poso paska kerusuhan bisa dikatakan aman. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan pengakuan seorang warga yang bernama Salim yang menetap di kecamatan Poso pesisir kabupaten Poso, yang mengatakan bahwa ia dan penduduk akan meninggalkan daerah yang mereka tinggali sekarang jika pasukan TNI ditarik dari daerah mereka.

Terjadi pembakaran lagi yang tanggal 1 Oktober 2000 sekitar jam 12.30 wita yang menimpa rumah seorang penduduk muslim. Melihat fenomena ini, banyak kalangan yang mengatakan, bahwa situasi Poso belum bisa dikatakan aman sepenuhnya. TNI dari Yon 711 Kompi A Luwuk pagi tadi telah ditarik kembali ke markasnya di Luwuk. Melihat penarikan TNI ini, sebagian masyarakat menilai dengan ditariknya pasukan ini kembali ke markasnya, bisa menimbulkan situasi yang memanas kembali di kota Poso.

22 Oktober 2000

Kesepakatan adat yang ditandatangani di Poso saat kedatangan Presiden RI yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perdamaian antar kelompok yang bertikai mulai diabaikan oleh kelompok

merah dan membuat kesan seakan-akan meremehkan umat Islam. Poin kelima dari kesepakatan tersebut yang berbunyi: *"Apabila kesepakatan ini telah ditandatangani bersama kemudian terjadi lagi kerusuhan oleh kelompok manapun, maka kelompok tersebut akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,"* mulai dilanggar Kelompok Merah dengan melakukan gangguan kepada umat Islam yang baru kembali dari pengungsian.

Salah satunya ialah yang terjadi di desa Pandiri Kecamatan Lage Kab. Poso yang hendak mengambil/memanen hasil kebunnya. Sebelum pergi ke kebun yang telah mereka tinggalkan sejak pecah kerusuhan akhir Mei 2000 lalu, mereka terlebih dahulu memberitahu pemerintah setempat. Mendapat izin dan tanggapan yang baik, maka keempat warga yang masing-masing bernama: Saharudin (30), Budi (30), Sumarlin (19) dan Naser (imam desa), berangkat menuju lokasi. Selama dua malam mereka belum mendapat gangguan apapun. Namun pada hari ketiga, Ahad 22 Oktober 2000, sekitar pukul 15.00 wita mereka diserang Kelompok Merah yang menggunakan penutup wajah. Merasa terancam dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok merah, maka Saharudin, Sumarlin dan Budi langsung meninggalkan tempat itu. Namun Naser tidak mengikuti ketiga temannya dan memilih untuk tetap tinggal di pondok miliknya. Pada jarak sekitar 100 meter dari pondok yang mereka tinggalkan, mereka melihat kepulan asap dari pondok yang mereka tinggalkan. Tanpa menunggu perintah, ketiganya langsung menceburkan diri ke sungai

dan berenang sampai ke Poso dengan menggunakan batang Pisang. Sesampainya di Poso, mereka langsung melaporkan kejadian yang mereka alami kepada POLRES Poso. Dan atas perintah Kapolres, Satuan Perintis yang dipimpin oleh Insp. Dua Tedjo langsung menuju TKP bersama dengan tim investigasi PKPU Poso. Namun setelah sampai di TKP, tim tidak menemukan sesuatu apapun kecuali batang-batang pohon coklat yang telah dirusak oleh Kelompok Merah, serta pondok yang telah rata dengan tanah setelah sebelumnya dilalap oleh si jago merah. Menurut keterangan yang dihimpun, pak Naser telah menyelamatkan diri ke Kolonedale Kabupaten. Morowali dengan menumpang PO Jawa Indah.

Kapolres Poso Drs. Jasman Baso Opu sangat menyayangkan kejadian yang menimpa keempat warga tersebut. Ia mengatakan kalau dirinya akan tetap memperhatikan ke-luhan yang demikian.

Apa yang dialami oleh keempat warga tersebut juga dialami oleh Widi dari desa Padang Lambara Kec. Poso Pesisir. Ketika hendak menengok kebunnya yang juga telah ditinggalkan sejak pecah kerusuhan, namun maksud hati belum terlaksana, mendadak ia ditodongkan senjata organik oleh salah seorang anggota Kelompok Merah dan disuruh untuk meninggalkan kebunnya, jika tidak maka ia akan ditembak. Dengan penuh penyesalan Widi pulang dan tidak berani lagi kembali ke kebunnya. Saat ini Widi memilih untuk tetap tinggal di pengungsian ketimbang pulang ke kampung yang situasi keamanannya belum menentu.

Dari peristiwa di atas, ada gejala ketidakkonsistensi atas perjanjian damai yang telah ditandatangani oleh satu kelompok tertentu. Kalau perjanjian damai yang ditandatangani dan dibacakan dihadapan presiden dilanggar, bagaimana nasib kota Poso selanjutnya.

26 Oktober 2000

Kelompok Merah Melanggar Lagi

Upaya aparat dalam menciptakan suasana Poso menjadi aman dan kondusif rupanya merupakan suatu hal yang sulit. Penempatan satuan BRIMOB nampaknya belum memberikan rasa aman bagi penduduk muslim di Poso. Perjanjian yang pernah ditandatangani serta dibaca dihadapan Presiden saat berkunjung ke Poso dalam rangka mendamaikan dua kelompok yang bertikai, juga dilanggar oleh kelompok merah.

Salah satu bukti pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok merah adalah kejadian pada tanggal 26 Oktober 2000 di Tentena kec. Pamona Utara.

Hari itu, Kamis, dua orang warga Bugis yang hendak mengambil uang mereka di BRI Tentena dibantai dengan tidak manusiawi di depan BRI Tentena. Darwis (19) dan Adi (30) bemiati mengambil uang mereka di BRI Tentena, namun belum sempat mereka masuk ke BRI, keduanya dihadang oleh massa Kristen yang berada di sekitar BRI. Demikian banyaknya yang mengeroyok, keduanya tidak bisa melakukan perlawanan. Kedua muslim tersebut langsung menemui ajal di tempat kejadian dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepala kedua korban dipenuhi dengan luka dan

mobil yang dikendarai korban dibakar oleh massa kristen. Kejadian ini dicatat oleh umat Islam sebagai satu pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok merah terhadap kesepakatan damai yang telah disepakati.

Tim investigasi PKPU yang melakukan pengecekan di RSU Poso melihat bahwa kejadian ini sangat tidak manusiawi. Informasi yang beredar bahwa pemimpin pengeroyokan tersebut ialah Bram Parimo. Sementara itu, Polres Poso membenarkan kejadian ini dan mengatakan pelakunya harus ditindak tegas agar supaya situasi tidak semakin memburuk.

TRAGEDI POSO IV

30 Juni 2001

Kelompok Merah menyerang aparat yang sedang menjalankan tugas di daerah Sayo, Kecamatan Poso Kota. Seorang anggota Polisi Militer dan seorang warga muslim tewas.

Namun menurut Crisis Centre GKST, kerusuhan yang disebut-sebut sebagai Tragedi Poso IV itu dimulai dengan adanya penyerangan kelompok Putih dibantu aparat Brimob terhadap warga Nera di Desa Lee, Kecamatan Lage, selain itu juga pembakaran rumah orang Kristen di Desa Tongko.

2 Juli 2001

Datang delegasi Tana Poso dari Tentena (dipimpin oleh J. Santo) ke Kota Poso menemui anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka yaitu menuntut Tana Poso menjadi milik mereka, orang Pamona sebagai penduduk asli berdasarkan sejarah Poso yang selama ini mereka

pahami. Kapolres Poso, Jasman Baso Opu tidak memberikan izin. Mereka kembali ke Tentena setelah dihadang oleh penduduk Poso Kota di Sayo.

3 Juli 2001

Pada pukul 04.00 terjadi pembunuhan 14 orang di Dusun Buyung-katedo, termasuk salah satu korban ialah Imam Masjid yang bernama Musa (49 tahun).

19 Juli 2001

Puluhan rumah di Pendolo, Pamona Selatan dibakar massa. Dalam peristiwa ini 2 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka. Pada hari ini juga Laskar Jihad Ahlus Sunnah Waljamaah resmi menyatakan keberadaan mereka di Sulawesi Tengah. Ayip Syafrudin menyempatkan diri melaporkan kehadiran mereka ke DPRD dan Gubernur Sulawesi tengah. Kegiatan mereka adalah memberikan bantuan social, pelayanan masyarakat, advokasi, dakwah dan membela kaum muslim yang tertindas. Awalnya mereka beranggotakan 12 orang dan menetap di Palu.

29 Juli 2001

Mapolda Sulteng dilempar bom ketika sejumlah warga dari Poso melakukan unjuk rasa ke DPRD Sulteng.

3 September 2001

Rektor Universitas Sintuwu Maruso, Drs. Jacobus Pogege, ditembak orang tak dikenal dan mengakibatkan rector menjadi cacat.

20 Oktober 2001

Terjadi kontak senjata di Desa

Batalembah, Poso Pesisir. Seorang aparat keamanan Serda Ardiansyah menjadi korban.

21 Oktober 2001

Jam 02.00 dini hari, di Kelurahan Mapane, petugas Brimob menghadang sejumlah massa dari Bonesompe yang berencana ke Tabalu untuk memberi bantuan. 42 orang ditahan karena terbukti membawa senjata rakitan, parang dan senjata tajam lainnya. Karena peristiwa itu, sebagian massa Kota Poso marah, mengadakan unjuk rasa ke Kapolres Poso, meminta agar semua Brimob di pos-pos penjagaan ditarik.

23 Oktober 2001

10 pos penjagaan Brimob dibakar massa. Sejak saat itu sering terjadi penembakan. Di Tokorondo petugas pendataan pengungsi ditembaki. Bus Jawa Indah pernah ditembaki namun tidak ada korban jiwa.

TRAGEDI POSO V HAKTI - DHARMA - WASPAD

26 November 2001

Masyarakat muslim di Tabalu mengetahui adanya konsentrasi massa Kristen di Desa Batalembah.

27 November 2001

Massa Islam mengadakan serangan ke Desa Batalembah. Ada dugaan massa Islam dibantu oleh Laskar Jihad, mereka dapat menguasai Desa Batalembah, Padalembara, Pentangolembah dan Patiwunga. Korban tewas di pihak Kristen 34 orang dan puluhan lainnya luka-luka.

28-29 November 2001

Desa Tangkura dikuasai, para

penduduk mengungsi sampai Sanginora. Di Desa Dewua 135 rumah dibakar begitu juga dengan Sanginora, 285 rumah hangus dibakar massa. Penduduk pergi ke arah lembah Napu.

01 Desember 2001

Pukul 19.30 Desa Sepe dan Silanca, Kecamatan Lage juga ikut diserang massa. Para penyerang masuk dari Dusun Buyungkatado. Pertikaian dapat dihentikan setelah aparat keamanan datang meminta masyarakat supaya mundur pada jam 20.30.

Juni 2002

Awal Juni, bom mengguncang Poso. Ledakan yang merusakkan Bus Antariksa jurusan Palu-Poso-Tentena itu berlangsung di Desa Toini, 10 kilometer dari arah barat Poso. Kala itu bus yang mengangkut 25 penumpang ini tengah melaju dari arah Palu menuju Poso. Empat penumpang tewas dan 16 orang luka 'berat dan ringan akibat bom yang menggetarkan kawasan konflik pasca penandatanganan Malino I.

26 September 2002

Sebuah bom meledak di Kota Poso, Sulawesi Tengah, sekitar pukul 09.30 WITA. Meski tak ada korban jiwa, ledakan melukai empat penumpang angkutan kota yang berada di depan Pasar Sentral Poso. Bom juga menghancurkan sebuah mobil yang berada di belakang mobil angkot, bom meledak persis 10 meter dari Kantor Kepolisian Resor Poso.

30 Januari 2003

Satu Satuan Setingkat KOMPI (SSK) Brimobda Sulawesi Tenggara,

hari Rabu diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah, untuk mendukung operasi pemulihan keamanan Sintuwu Maroso di daerah bekas konflik itu. Kepala Dinas Penerangan Polda Sultra AKP Muharam di Kendari, Kamis, mengatakan, anggota Brimobda yang akan di BKO-kan ke Polda Sulteng tersebut dilepas oleh Kapolda Sultra Brigjen Pol Tengku Asikin Husein di pelabuhan Kendari. KOMPI Brimob itu menumpang kapal Pelnis KM Tilongkabila menuju Kolonodale, Kabupaten Morowali, Sulteng, kemudian menumpang kendaraan darat menuju Poso dengan jarak 230 km. Kapolda Tengku Asikin Husein dalam sambutannya meminta para anggotanya agar dalam menjalankan tugas pemulihan keamanan di Poso, senantiasa bertindak profesional, proporsional, netral dan memperhatikan norma-norma kemanusiaan.

Dikemukakan pula, motto Brimob yakni *'sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil'* agar dipegang teguh dengan penuh disiplin dan semangat pengabdian yang tinggi. Pengiriman Brimobda Sultra ke Poso tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah pengiriman tahun 2002 dan dinilai berhasil menjalankan misinya selama hampir setahun di daerah itu.

Akhir Mei 2003

Seorang petani, Jabir (22 tahun) tewas ditembak di Kelurahan Lembo-mawo, belum diketahui siapa penembaknya.

Awal Juni 2003

Di Dusun Madele, Poso Kota, terjadi penembakan yang menewaskan seorang warga bernama Yefta

Barumuju (37 tahun).

Kamis, 23 Juli 2003

Terjadi ledakan bom rakitan tepat di depan rumah Mochammad Husen di Jalan Pulau Irian, jam 01.15 WITA.

7 Agustus 2003

Seorang warga tewas (Manto, putra Arsia Ali) akibat ledakan bom yang mengguncang Kota Poso pada pukul 09.00 WITA. Sumber ledakan berasal dari rumah Arsia Ali di jalan Pulau Sabang, Kelurahan Kayamanya, Uniknya, menurut Kapolda Sulawesi Tengah, korban Manto termasuk salah seorang dari 38 tersangka yang masuk dalam DPO Polda Sulteng, karena diduga terlibat kasus pembakaran bus penumpang PO Linda Jaya tahun 2001 dan peledakan bom di Kafe Victoria awal Juli 2003.

12 Oktober 2003

Terjadi penyerangan dan penembakan di desa-desa Kecamatan Poso Kota dan Poso Pesisir. Korban tewas berjumlah 9 orang. Desa pertama yang diserang adalah Desa Madale, Kecamatan Poso Kota. Satu rumah hangus terbakar.

Kemudian terjadi penyerangan di Dsa Pinedapa, Kecamatan Poso Pesisir, 25 km dari Dsa Madale. Empat orang luka tertembak. Serangan berikutnya terjadi di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir yang menewaskan tiga orang akibat luka bacokan pada bagian tubuh dan kepala. Di Desa Patangolemba, Kecamatan Poso Pesisir, mengakibatkan lima warga tewas dan sembilan orang luka tembak.

Oktober 2004

Senin, 18 Oktober 2004

Jam 10,30 WITA, 11 orang fungsionaris KBPM (Komite Bersama Pemuda Morowali) yang dipimpin oleh Kristo Tumakaka datang ke Polda Sulteng, diterima langsung oleh Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs. Aryanto Sutadi Msc, menyampaikan aspirasi dan harapan agar Polda Sulteng mengusut kembali secara tuntas kasus dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Bupati Morowali Andi Muhammad. Selain ke Polda Sulteng, mereka juga mendatangi Kejati Sulteng dengan maksud yang sama.

Jam 19.00 WITA, terjadi penganiayaan berat terhadap korban Mahmut alias ATU, suku Gorontalo, di Poso Kota. Dia dibacok oleh dua orang pengendara motor tek dikenal, dari belakang.

Selasa, 19 Oktober 2004

Jam 10,00 WITA, di pasar Sentral Poso ditemukan amplop yang bertuliskan "Dari Laskar Kristus Pembela Domba-domba buat muslim yang lagi berduka", isi surat intinya merupakan provokasi untuk membangkitkan amarah umat Islam dengan cara mengadu domba dan menyebarkan isu-isu.

Rabu, 20 Oktober 2004

Di gedung DPRD Morowali berlangsung sidang paripurna DPRD Morowali dipimpin oleh Ketua DPRD DR (HC) Zaenal Abidin Ishak, dengan keputusan sidang: memfungsikan Bungku sebagai ibukota definitive Kabupaten Morowali sesuai dengan surat keputusan DPRD Morowali Nomor 11 tahun 2004.

Jam 24,00 WITA, Komite Bersama Pemuda Morowali (KBPM) dipimpin oleh Kristo Tumakaka, melakukan aksi unjuk rasa yang dilanjutkan aksi menduduki kantor DPRD Morowali. Aksi tersebut merupakan aksi penolakan terhadap keputusan DPRD. Salah satu spanduk yang dibawa bertuliskan: 'Komite Bersama Pemuda Morowali (KBPM) pertahankan ibukota Kolonodale hingga tetes darah terakhir'.

Kamis, 21 Oktober 2004

Jam 21,30 WITA, di belakang Gereja Bethani telah terjadi penembakan terhadap Hans Lanipi (27 tahun) agama Kristen di bagian tengkuk tembus, dilakukan oleh dua orang mengendarai sepeda motor.

Minggu, 24 Oktober 2004

Jam 12,30 WITA, ditemukan 15 bom rakitan dan 108 yang masih kosong di dekat pekuburan umum, Kecamatan Poso oleh warga bernama Hadi Salamun (51 tahun).

Sabtu, 30 Oktober 2004

Ismunandar (35 tahun) Agama Islam, yang dinyatakan hilang sehari sebelumnya di Kec. Pamona, diketemukan dan mengaku sempat disandera dan diinterogasi oleh sekelompok orang bersenjata tak dikenal.

Minggu, 31 Oktober 2004

Masyarakat Bungku melakukan sweeping di beberapa tempat dengan tujuan melarang Camat, Kades, Toda, Toga dan Tomas menghadiri pertemuan dengan Bupati, Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako di Kolonodale tanggal 1 November 2004.

November 2004

5 November 2004

Terjadi pembunuhan sadis terhadap kepala Kades Pinedapa di Kecamatan Poso Pesisir.

8 November 2004

Terjadi penembakan sopir angkutan (Tomy Sanjaya, 40 tahun) pedesaan trayek Poso-Tentena pp, pihak kepolisian sempat "menutup" pintu masuk-keluar wilayah Poso guna mencegah pelakunya melarikan diri.

Sabtu, 13 November 2004

Terjadi ledakan bom yang menimpa mobil angkutan pedesaan di depan Pasar Sentral Poso dengan menewaskan enam orang serta mencederai tiga lainnya.

26 November 2004

Guna mengantisipasi munculnya kembali aksi kekerasan di daerah bekas konflik Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), aparat keamanan hingga kini masih melakukan pemeriksaan ketat di semua pintu masuk-keluar wilayah tersebut.

Sejumlah awak angkutan kota dalam provinsi (AKDP) trayek Palu Poso-Luwuk pp di Palu, Jumat, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan aparat gabungan itu berlangsung hampir pada semua pos penjagaan yang ada di sepanjang jalan negara dan jalan provinsi dalam wilayah Poso.

"Kendaraan umum maupun pribadi selalu diberhentikan di pos-pos penjagaan, terutama ketika memasuki Kabupaten Poso dan kota Poso guna menjalani pemeriksaan," kata seorang sopir PO Super Motor yang baru tiba di Palu setelah mengangkut penum-

pang balik lebaran dari Luwuk, kota di bagian timur Provinsi Sulteng.

Pemeriksaan ketat itu sudah berlangsung kurun dua pekan terakhir, umumnya awak kendaraan dan penumpang memahami "razia" yang dilakukan petugas sehingga mereka selalu kooperatif.

Umumnya hampir di setiap pos penjagaan yang ada di jalan nasional Trans Sulawesi dan jalan provinsi, kendaraan yang melintas "diwajibkan" melapor di pos penjagaan sebelum kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif.

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Rais Adam SH mengatakan upaya pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lalu lalang di jalan raya dalam wilayah Poso itu, merupakan langkah preventif untuk menghindari munculnya kembali aksi kekerasan yang membawa korban manusia.

b. Situasi kriminalitas di wilayah sulteng dan sekitarnya

1) Bila kita mencermati data yang ada maka trend / perkembangan gangguan kamtibmas khususnya di wilayah Sulteng dan sekitarnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan yang mungkin dapat diindikasikan ada benang merah atau korelasinya dengan munculnya konflik di wilayah Poso dan sekitarnya. Adapun contoh-contoh kejahatan yang masih mengemuka hingga saat ini, sekaligus sebagai indikator munculnya gangguan kamtibmas adalah sebagai berikut :

d) Bentuk kejahatan keuangan negara

No	Jenis gangguan	1999		2000		2001		2002		2003		Ket
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Kas Negara</u>											
	Makar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Separatisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rusmas	115	-	98	-	101	2	97	-	94	4	
	Sabotase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Babat hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Konflik Sara</u>											
	Antar kamp/ds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antar suku/etnis	3	-	29	2	69	2	22	2	7	-	-
	Motif agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konservasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Konflik aparat</u>											
	Perkhh TNI/Polri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kantor/asrama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	118	-	127	2	170	4	119	2	101	4	

7. Hipotesa Analisis

a. Masalah suku bangsa

Secara historis, asal muasal penduduk Poso (termasuk masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya) adalah migran dua generasi yaitu: (a) dari arah utara sekitar Kepulauan Jepang, melalui Minahasa, Gorontalo dan menyusuri teluk Tomini; (b) dari pantai barat teluk Bone. Mereka umumnya tinggal di pesisir pantai, sekitar danau dan lembah-lembah sungai Poso, Kalaena dan Laa.

Lembah sungai Poso dihuni (1) To Wingke Mposo (orang-orang pinggir sungai Poso. (2) To Pebato di sebelah barat sungai Poso, yang semula ditempati To Pajabi yang sudah punah, (3) To Lage di sebelah timur sungai Poso dengan dua kelompok kecil yaitu To Kadombuku dan To Rumpu. (4) To Palande. (5) To Pu'u-mboto dan (6) To Bantjea.

Lembah sungai Kalaena dihuni To Lampu, meliputi: (1) To Salumaoge, di bagian atas lembah Kalaena. (2) To Rompu Lewonu di sepanjang utama dari Malili ke Palopo.

Lembah sungai Laa terdiri: (1) To Pada dari pegunungan Mori di selatan sampai pegunungan Pom-pangeo di utara, mencakup: To Watu, To Kalae, To Tamanda, To Pu'umbana. (2) To Onda'e di sebelah timur Tentena sampai hulu sungai Poso. (3) To Pakambia.

Diantara semua suku di atas To Onda'e dan To Lage sebagai suku tertua.

Dalam perkembangannya, masyarakat yang tinggal di pegunungan bertahan dengan ritus animisme yang mereka anut. Sedang yang tinggal di pesisir, telah mengalami hubungan dagang dan hubungan lainnya dengan generasi yang datang kemudian, terutama pada

abad ke 18 seperti dari (a) Bugis yang terutama tinggal di Poso Kota, Poso Pesisir dan beberapa di Morowali, (b) Gorontalo yang mendiami Poso Kota, sebagian Poso Pesisir, Ampana Kota, Ampana Tete, Wakai dan Walea Kepulauan.

Karena pada umumnya etnis Bugis dan Gorontalo itu menganut agama Islam, maka daerah yang dihuni oleh mereka dengan cepat berkembang menjadi daerah mayoritas Islam.

Gabungan beberapa generasi sampai pertengahan abad ke 19 itulah yang kemudian membentuk komunitas Poso yang terpetakan menurut perkembangan pemukiman (yang kemudian membentuk komunitas agama dan etnis) dengan karakteristik masing-masing.

Belum lagi kemudian dengan kedatangan para pendatang dari Cina dan India yang semakin membentuk komunitas tersendiri, hidup berdampingan dengan masyarakat Poso lainnya, semakin menambah berragamnya masyarakat Poso.

Bahkan pada tahun 1920, pemerintah kolonial Belanda telah mengadakan sensus yang membagi masyarakat Poso menjadi empat komunitas yaitu: Pribumi (57.157 jiwa), Eropa (60 jiwa), Cina (596 jiwa) dan Arab (285 jiwa).

Fenomena ini menarik, karena kolonial Belanda tidak membagi Poso dengan berbagai suku bangsa 'asli' atau 'pendatang', namun mengelompokkan mereka menjadi satu komunitas yaitu: penduduk pribumi. Keadaan ini terus berlangsung sampai kemerdekaan Indonesia.

Berpijak pada realitas di atas, kiranya sulit memilah masyarakat

Poso menjadi dua yaitu Pamona (sebagai penduduk asli) yang umumnya tinggal di pedalaman dan kaum pendatang yang umumnya tinggal di pesisir.

Beberapa kasus mengenai etnik dan suku bangsa di tanah Poso sering menjadi penyebab konflik komunal yang tak berujung. Masing-masing 'pribumi' mengklaim bahwa mereka adalah penduduk asli yang berhak atas daerah tertentu atau masyarakat tertentu.

Seperti isu yang berkembang pada 2 Juli 2001, ketika massa dari Tentena yang mengatasnamakan diri Delegasi Tanah Poso datang ke Kota Poso mengklaim dan menuntut Tana Poso sebagai miliknya berdasar sejarah Poso. Penduduk asli Poso, menurut mereka adalah suku Pamona. Ini mendapat tantangan yang sangat luar biasa dari penduduk 'asli' lainnya. Karena pada dasarnya, menurut sejarah lama Poso, penduduk asli menjadi begitu heterogen, dan menduduki daerah-daerah tertentu sehingga menciptakan komunitas tersendiri.

Pergeseran kultur yang ada di Poso, dengan semakin heterogennya suku bangsa karena semakin banyaknya pendatang dengan berbagai etnik dan agama, mulai merubah komposisi komunitas. Problem sosio-ekonomi dan kultural mulai mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Poso.

Para 'penduduk asli' mulai menjual tanah adat (tanah waris) hanya untuk kepentingan pesta dan untuk 'biaya' masuk kerja di perkotaan, termasuk menjadi pegawai negeri.

Pembangunan jalan yang begitu pesat, memberikan peluang sangat

besar bagi migran dari daerah lain ke Poso, dan ini dengan cepat akan menggeser pola bermasyarakat Poso. Dan akan berakibat semakin banyak tanah akan dibeli dan dimiliki oleh para pendatang, apalagi setelah tanaman coklat menjanjikan prospek besar. Hal ini, cepat atau lambat mulai menumbuhkan rasa iri hati kedua kelompok, terutama Kristen yang selama ini sebenarnya sangat mempengaruhi peta Poso.

Sehingga issue tentang Arif Patanga (muslim) yang jadi Bupati, telah mulai memunculkan politisasi jabatan yang dikait-kaitkan dengan komunitas agama tertentu. Ditambah lagi dengan diangkatnya Ny. Rahmah Patanga menjadi Kabag Kepegawaian Setwilda Tk II Poso (1997-1998).

Para pejabat mulai terpolarisasi, keadaan ini semakin tak menguntungkan akar bawah yang begitu sederhana menangkap apapun, termasuk ketidaktahuan mereka terhadap konspirasi para elit politik dan pejabat yang sengaja memanfaatkan peluang ini.

'Pendidikan' moral kepada para pejabat dan elit politik harus menjadi konsentrasi berbagai pihak. Terlalu naif mengorbankan persatuan bangsa hanya untuk kepentingan segelintir orang yang sangat rakus dan tamak akan harta dan kedudukan yang telah merubah mereka menjadi dinosaurus yang setiap saat menelan korban ribuan jiwa rakyat tak berdosa.

Kedudukan, pangkat dan harga diri para pejabat dan elit politik tak bermoral ini telah menempatkan bangsa kita di mata dunia sebagai bangsa yang tak mampu menciptakan keamanan di rumah sendiri, bahkan menggolongkan bangsa kita

sebagai bangsa bar-bar yang haus darah.

Bangsa kita semakin terpuruk di tengah kehancuran ekonomi yang tak henti-hentinya. Kita semakin menjadi bulan-bulanan bangsa asing. Pemerintahan kita semakin tak berharga duduk berdampingan dengan bangsa lain karena mereka menganggap bangsa kita bangsa tak beradab dan tak berpendidikan.

Jika para pejabat dan elit politik tak bermoral itu tak mampu lagi menangkap pesan-pesan moral bangsa, tak ada cara lain selain dengan tegas dan bertanggungjawab Kepolisian RI bekerjasama dengan pihak-pihak terkait melakukan perang terbuka dengan mereka demi menyelamatkan keberlangsungan tanah air ini, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah berurat akar sejak ratusan tahun lalu.

b. Masalah agama

Tidak seperti di Pulau Jawa, di Poso tidak ditemukan petunjuk sejarah mengenai pentahapan masuknya agama Hindu, Islam dan Kristen. Bahkan sampai hari ini belum ditemukan petunjuk sejarah bukti peninggalan Hindu. Masyarakat Poso 'lama' mumi penganut animisme penghuni pegunungan terpencil, yang percaya bahwa nenek-moyang, gunung dan pohon memiliki roh yang dapat mendatangkan ancaman atau perlindungan.

Masyarakat 'lama' Poso melembagakan setiap peristiwa kehidupan yang terjadi dengan melakukan ritual-ritual tertentu seperti saat-saat kelahiran, kematian, perkawinan. Upacara panen dikenal dengan sebutan Mopadungku.

Sintuwu yang sudah mentradisi dan sangat terkenal di kalangan masyarakat Poso adalah suatu aktivitas, kerjasama, gotong-royong seluruh masyarakat terhadap segala kinerja yang berhubungan dengan alam atau apapun.

Pada abad 18 agama Islam yang dibawa para pedagang telah membentuk entitas Islam di Pesisir yang dianut oleh hampir seluruh etnik di pesisir, seperti salah satu etnik To Lage.

Baru pada penghujung abad ke 19 Kristen mulai masuk ke pedalaman. Sasarannya adalah penduduk yang masih menganut animisme, karena menurut Kruyt, di pesisir, Islam sudah sangat berkembang luas, dan ini sangat menyulitkan penyebaran Kristen.

Sejak September 1894, politik agama yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yaitu dengan menempatkan kontrolir, mulai memainkan peran penting bagi penyebaran agama Kristen di Poso.

Intervensi kolonial Belanda dengan meng'kristen'kan Poso sebenarnya bukan dilandaskan pada semangat keagamaan, tetapi lebih mengarah pada kepentingan politik mengingat bahwa pada saat itu aksi pembangkangan pribumi umumnya dimobilisir Islam dan adanya Islamophobia terkait dengan perang salib.

Kolonial Belanda, secara implisit, tampak memang ingin membenturkan Poso (dengan mengatasnamakan agama) untuk kepentingannya. Ini terlihat jelas dari sumbangan yang diberikan Belanda pada tahun 1917 ialah: umat Islam yang mayoritas hanya diberi f 127.092, sedangkan masyarakat Kristen yang minoritas diberi f 1.235.500. Bukan itu saja,

dalam perkembangan berikutnya pemerintah kolonial membantu fasilitas pendidikan yang terutama diisi oleh orang-orang Kristen. Hal ini sengaja dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk menyebarkan Kristen dan sekaligus untuk dipersiapkan bagi kepentingan politik mereka.

Dengan gigih, sejak tahun 1894, pemerintah kolonial Belanda dengan terang-terangan melakukan 'kristenisasi' di Poso dengan memfasilitasi apapun demi kepentingan penyebaran Kristen. Salah satunya fasilitas pendidikan yang sangat efektif bagi penyebaran agama. Terbukti pada tahun 1938 jumlah penduduk Poso 61.179 jiwa, dan 41,7% adalah pemeluk agama Kristen. Pesatnya perkembangan Kristen di Poso sangat dipengaruhi oleh campurtangan pemerintah kolonial Belanda..

Sebagian besar pegawai pemerintahan dan sektor-sektor penting pengambilan kebijakan banyak diisi oleh komunitas Kristen. Ini dapat dipahami karena saat itu komunitas Islam tidak punya fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan berjalannya waktu, sampai dengan tahun 1938 komunitas Kristen tercatat memiliki kualifikasi pendidikan di atas komunitas Islam yang akhirnya hanya mengisi sektor perdagangan, petani dan nelayan.

Pesatnya perkembangan Kristen yang difasilitasi oleh pemerintahan kolonial Belanda telah menciptakan image bahwa Poso identik dengan komunitas Kristen, sampai ke luar negeri.

Februari 1939, dibentuk komisi tiga yang terdiri dari J. Kruyt, H. Perdok dan K. Riedel yang bertugas mempersiapkan struktur, mekanisme

kerja dan peraturan lainnya bagi pembentukan organisasi gereja di Sulawesi Tengah. Rencana ini berhasil dengan lahirnya GKST (Gereja Kristen Seluruh Indonesia) diikuti dengan membangun dan memberdayakan sarana transportasi dan infrastruktur bagi kepentingan penyebaran Kristen, seperti: Bandara Kasih Guncu, di Poso pesisir yang menghubungkan Poso dengan Tentena dan Poso dengan lembah Napu, Besoa dan Bada serta kota-kota kecil pedalaman Kalimantan Timur.

Penyebaran Kristen yang difasilitasi pemerintah Kolonial Belanda itu mengalami kemajuan luar biasa. Tercatat di awal-awal kemerdekaan penduduk Poso yang menganut agama Kristen hampir menembus angka 75%, angka yang sangat signifikan dan sangat mempengaruhi Poso.

Namun, semenjak kemerdekaan RI, terjadi pergeseran kebijakan atau perubahan kebijakan yang dicanangkan pemerintah RI bagi seluruh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah proyek transmigrasi.

Terjadi pergeseran jumlah penduduk dengan munculnya proyek transmigrasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Dominasi Kristen di berbagai sektor-sektor penting mulai mengalami pergeseran. Jumlah penduduk beragama Islam mulai menyeimbangi pemeluk Kristen.

Yang mengejutkan, pada tahun 1997, prosentasi pemeluk agama Kristen menurun sampai di angka 36% dibanding Islam yang naik menjadi 62%, selebihnya Hindu dan Budha. Fakta ini kemudian dipolitisasi oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab dalam konteks komunisme.

Isu 'persaingan' agama ini semakin lama semakin keras menjadi 'iming-iming' yang menggiurkan bagi sekelompok orang yang punya kepentingan pribadi, yang tidak begitu peduli dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Akar bawah yang begitu rentan terhadap berbagai isu, termasuk di dalamnya isu agama, etnik dan sosial-ekonomi menjadi dengan mudah dikendalikan oleh para oportunist biadab untuk saling tikam, bunuh dan pembumihangusan apa saja.

Gejala timbulnya konflik komunal Poso, sebetulnya sudah pernah terjadi sebelum Desember 1998, yaitu pada tahun 1992. Ketika itu, Rusli Labolo sebagai pendeta Kristen (sebelumnya Muslim) menghujat Nabi Muhammad dengan mengatakan antara lain bahwa Islam itu tak ada dan Muhammad bukan Nabi, bukan Rasul. Pernyataan ini sangat meresahkan masyarakat Islam.

'Percikan' kerusuhan berindikasi SARA itu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 15 Februari 1995 terjadi pelemparan masjid dan madrasah di Desa Tegalrejo oleh sekelompok pemuda Kristen dari Desa Madale, dan mendapat perlakuan pemuda-pemuda Islam dari Desa Tegalrejo dan Desa Lawanga dengan melakukan pengrusakan rumah di Desa Madale.

Kerusuhan-kerusuhan inilah yang 'memungkinkan' menjadi bibit dari pertikaian besar pada awal Desember 1998, yang menyebabkan konflik berkepanjangan dan sangat merugikan itu.

Melihat konflik Poso sebagai konflik agama, sangat berlebihan, apalagi mengangkatnya sebagai akar

permasalahan penyebab konflik. Barangkali, kalau 'terpaksa' ingin kita adopsi agama sebagai akibat dari sumber permasalahan, lebih hanya sebagai perwujudan konflik antar umat, dengan segala kondisi tendensius di belakangnya.

Kalau kita mau melihat ke belakang, sejarah perjalanan agama di Poso memang sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan inilah sebab-musabab munculnya 'persaingan' agama yang turun-temurun. Namun sejauh ini, perbedaan itu tetap terjaga karena kuatnya rasa persaudaraan yang tumbuh di masyarakat Poso jauh sebelum Islam dan Kristen masuk di Poso.

Penghayatan keagamaan yang baik salahsatunya harus mengimplementasikan kerukunan antar umat beragama yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa aman, tenang dalam membangun rohani dan jiwa yang selalu haus akan sentuhan dzat Allah ini.

c. Masalah ekonomi

Pendapatan perkapita Kabupaten Poso berdasarkan harga konstan 1993, pada masa pra konflik 1993-1997 tumbuh sebesar 8,3% pertahun. Angka ini menggembirakan, namun setelah pecah konflik turun jadi -1,7%.

Tingkat pengangguran pada angkatan kerja di tahun 2000 sebesar 3,3 persen dari jumlah angkatan kerja sebesar 100 ribu orang. 3.400 orang pengangguran di Poso dapat menimbulkan masalah serius. Karena beban ekonomi, mereka dapat dengan mudah dipengaruhi sebagai pemicu konflik.

Kesenjangan ekonomi yang terjadi pasca keruntuhan pereko-

nomian kita sejak Mei 1998 memberikan 'sumbangan' cukup besar bagi pecahnya konflik di Poso ini. Ditambah, sebelumnya antara tahun 1993-1998 melalui indikator PDRB, justru perekonomian di Poso mengalami tingkat penurunan yang cukup signifikan yaitu -3,4 persen.

Tahun 2000 kembali PDRB terjungkalkan sampai -5 persen, yaitu dari Rp 277 miliar menjadi 264 miliar, terparah pada sektor pertanian. Belum lagi kalau kita melihat tingginya angka pengangguran sebesar 3,3 persen atau sejumlah 3.400 orang. Hal ini dapat menjadi masalah serius, karena jumlah yang tidak sedikit itu akan dengan mudah di eksplorir menjadi pemicu konflik.

Kesenjangan ekonomi antara suku Pamona dengan para pendatang sering dijadikan barometer kecemburuan di Poso. Seperti kita ketahui sektor perdagangan nyaris dikuasai oleh para pendatang, terutama Bugis yang mayoritas Islam. Dalam sensus penduduk, suku Pamona dalam sektor perdagangan hanya berkisar pada angka 1,4 persen. Padahal pedagang atau mereka yang menguasai pasar menempati posisi strategis secara ekonomi.

Hal inilah yang menyebabkan hubungan antara orang Pamona dengan orang pendatang menjadi sangat riskan. Para pendatang yang menguasai pasar, dianggap menguasai ekonomi secara keseluruhan.

Ini kemudian diartikan bahwa secara ekonomi terdapat ketimpangan antara orang Pamona dengan pendatang. Realitas ini tentu saja memudahkan orang-orang untuk mempolitisir isu ketimpangan ekonomi untuk merangsang solidaritas orang Pamona

dan kemudian menyetir pergerakan kelompok sesuai dengan keinginan mereka yang bermain dengan isu itu.

Masih dalam konteks ekonomi, kita juga dengan tegas dan bertanggungjawab harus menindak para oportunist bisnis yang memanfaatkan peluang bisnis kotor mereka dengan melakukan pasar bisnis besar-besaran menjual senjata dan keperluan lain yang berkaitan dengan konflik yang berkembang ini, termasuk diantaranya memanfaatkan pengungsian sebagai komoditas bisnis mereka.

d. Rekonsiliasi

Sepanjang tahun 2000, korban jiwa mencapai 267 jiwa, luka-luka sebanyak 187 jiwa, rumah yang rusak sebanyak 6.984 buah. Belum lagi puluhan ribu jiwa pengungsi yang tersebar di beberapa daerah. Di sekitar Kabupaten Poso saja tercatat sampai dengan bulan Juni 2001 sebanyak 13.022 KK atau selitar 48.364 jiwa.

Beberapa upaya rekonsiliasi sudah dilakukan, namun tak membuah hasil yang signifikan. Tanggal 25 Desember 1998 diadakan pertemuan di gedung Torulembah yang antara lain menghasilkan kesepakatan pencabutan izin penjualan minuman keras dan menutup tempat-tempat maksiat.

Tanggal 27 Desember 1998 di Togalu juga diadakan pertemuan antara masyarakat bertikai dengan dihadiri Bupati Arif Patanga, yang salah satu kesepakatannya ialah menghentikan konflik dan menindak tegas pelakunya.

Namun, kerusuhan masih terjadi lagi. 8 Januari 1999, kembali diadakan perundingan yang menghasilkan kesepakatan menghentikan

segala bentuk perselisihan dan mengadakan penggerak dan aktor lapangan kerusuhan, tapi pada bulan April 2000 terjadi kembali kerusuhan.

Pertemuan demi pertemuan diadakan, namun konflik seperti tak mengenal kesepakatan, terus berlangsung. Sampai pada tanggal 12 Juni 2000 pemerintah daerah memprakarsai pertemuan antara para tokoh agama Islam dan Kristen yang dikenal dengan "Operasi Cinta Damai" yang antara lain berisi kesepakatan kepada masyarakat untuk menyerahkan senjata. Tapi, kembali terjadi kerusuhan dengan menggunakan senjata tajam dan api.

28 Juli 2000, diadakan pertemuan gubernur se Sulawesi di Manado yang membahas upaya rekonsiliasi Poso. Keempat Gubernur itu sepakat untuk: (1) menghentikan segala bentuk kerusuhan, (2) mengadakan pertemuan lanjutan di Tentena, (3) mengajukan bantuan kepada pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga pemberi bantuan internasional, (4) melibatkan pimpinan informal dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa untuk mengadakan rekonsiliasi, dan (5) melakukan rehabilitasi mental terhadap para pengungsi di wilayah propinsi yang ada di Sulawesi.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya di Tentena pada tanggal 21 Agustus 2000, menghasilkan kesepakatan yang intinya adalah menjadikan musuh bersama masyarakat Sulawesi bagi mereka yang berani melakukan provokasi dan memulai melakukan kerusuhan kembali.

"Rujuk Sintuwu Maroso" dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2000

dengan dihadiri oleh Presiden RI, Bapak KH Abdurahman Wahid, yang isinya:

- Mendukung upaya Rujuk Sintuwu Maroso yang dilaksanakan di Kab. Poso, Sulawesi Tengah.
- Seluruh masyarakat kab. Poso ikut bertanggungjawab untuk menciptakan kedamaian atas dasar persaudaraan kekeluargaan demi kepentingan bangsa dan negara.
- Tetap menjadikan Sintuwu Maroso sebagai ikatan moral tanda persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan dari seluruh rakyat Kab. Poso dan kesepakatan ini adalah merupakan awal dari upaya menuju rujuk Sintuwu Maroso yang dikuatkan dengan upacara adat.
- Mendukung upaya penegakan supremasi hukum dalam menyelesaikan kerusuhan yang telah terjadi di Kab. Poso dan terhadap oknum-oknum yang secara nyata terlibat melakukan tindak pidana agar tetap dilakukan proses hukum demi tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat.
- Apabila kesepakatan ini telah ditandatangani bersama, kemudian terjadi lagi kerusuhan oleh kelompok manapun, maka kelompok tersebut akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa saat kesepakatan ini ditandatangani, terjadi lagi kerusuhan. Dengan kata lain, rekonsiliasi sudah dilakukan berkali-kali, namun seperti angin lalu. Demikian juga dengan Deklarasi Malino (19-20 Desember 2001) yang tidak tanggung-tanggung untuk pertamakalinya diprakarsai oleh Menko Kesra, Yusuf Kalla dan Menko

Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan hal ini dibawa oleh Presiden RI, Megawati ke Sidang Kabinet.

Tapi apa yang terjadi kemudian? Tetap saja terjadi pelanggaran dengan beberapa peristiwa penembakan dan pengeboman.

Efektifitas rekonsiliasi harus dipertanyakan. Apa sebenarnya akar permasalahan dari konflik yang tampaknya sangat sulit diselesaikan ini.

8. Kesimpulan

a. Mengenai Suku Bangsa/Etnik:

Perjalanan panjang sejarah masyarakat Poso perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius.

Ini sangat berkaitan dengan komunitas 'pendatang' dan 'penduduk asli'. Kondisi ini terbukti menjadi lahan subur bagi kepentingan politik dan ekonomi sejak zaman kolonial Belanda, dan berlanjut sampai hari ini.

Pergeseran kultur yang ada di Poso, dengan semakin heterogennya suku bangsa karena semakin banyaknya pendatang dengan berbagai etnik dan agama, mulai merubah komposisi komunitas.

b. Mengenai Agama:

Komunitas agama dipelintir dengan konsep dan pola-pola intelektual yang mengatasmakam kepentingan politik, ekonomi, sosial-budaya dan sejumlah paradigma yang begitu luhur oleh segelintir individu atau kelompok yang sangat berkepentingan memiliki 'massa' bagi kepentingannya.

Masyarakat akhirnya tak mampu membedakan antara agama secara hakiki dengan agama 'komunitas', yang tidak lagi memandang agama sebagai the way of life, namun agama lebih dipandang sebagai

'simbol etnik'.

Agama, adalah lahan potensial untuk memotivasi massa bagi kepentingan elit politik, pejabat dan peluang ekonomi tertentu dengan berbagai pola.

Apabila agama sudah mutlak menjadi isu yang gampang dikendalikan, masyarakat dengan mudah diracuni tanpa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, dengan mudah dieksploitir sebagai 'barang dagangan' politik dan kepentingan bisnis, yang pada akhirnya akan merusak moral bangsa untuk beberapa dasawarsa ke depan.

Kerancuan pemahaman umat terhadap agama-agama yang dianutnya, setidaknya ada empat hal, yaitu:

- 1) Bahwa 'agama' lebih dipandang sebagai simbol daripada sebagai sebuah agama yang berprinsipkan keimanan.
- 2) Agama hanya dipandang sebagai praktik ritual 'keagamaan' seperti 'berkunjung' ke tempat ibadah, sembahyang, puasa, dan lain-lain yang kering akan nilai-nilai rohaniyah dan prinsip-prinsip dasar firman Allah.
- 3) Keimanan yang menjadi dasar ukhuwah dan silaturahmi menjadi kabur, yang muncul adalah keterikatan emosi sempit 'sego-longan' umat yang memandang 'agama' lain adalah musuh yang harus ditumpas.
- 4) Agama hanya menjadi simbol yang mati dan tak bermakna, dibingkai dengan hubungan horizontal sempit yang memandang manusia adalah barang mati dan tak diberi kebebasan untuk meningkatkan intelektualitasnya yang justru menjadi ukuran

manusia di mata Tuhan, sesuai dengan firmanNya yang selalu menekankan tidak adanya paksaan dalam agama.

Kesalahan memahami hakikat agama itulah yang telah menjerumuskan masyarakat Poso saling benci pada saudara 'tak seiman', yang selama ini begitu dijaga kerukunannya. Mereka saling menghancurkan dengan mengatasnamakan agama, padahal sebenarnya hanya kelompok/komunitas agama. Maka tak pelak lagi, konflik Poso telah melahirkan adanya konflik komunitas keagamaan, bukan konflik agama.

Dan segera ini dimanfaatkan oleh elit-elit politik dan pihak-pihak ketiga dengan:

- a. Memanfaatkan bentrokan atau kerusuhan yang timbul di masyarakat sebagai kendaraan politik bagi para elit politik tertentu sebagai *bargaining-power* yang akan menguntungkan dirinya.
- b. Memanfaatkan bantuan pengungsi sebagai komoditas politik dan sumber pendanaan bagi kepentingan para elit politik maupun pejabat tertentu.
- c. Memanfaatkan konflik untuk menghancurkan lawan politik mereka.
- d. Memanfaatkan konflik untuk memperalat TNI dan Polri sebagai kekuatan politik elit tertentu.
- e. Memanfaatkan bentrokan atau kerusuhan yang timbul di masyarakat sebagai peluang pasar untuk menjual produk-produk persenjataan dan pertahanan diri yang sangat dibutuhkan para pihak yang bertikai.
- f. Memanfaatkan pengungsian sebagai pasar yang produktif

untuk meluaskan jaringan bisnis pihak-pihak tertentu.

Dari analisa di atas, pemecahan permasalahan tidak akan berhasil apabila dikonsentrasikan hanya pada aspek keamanan semata tanpa melibatkan aspek-aspek agama, adat-istiadat, bisnis dan keboborokan mental para pejabat dan elit politik tertentu..

a. Mengenai Dialog:

Dialog ternyata menempati urutan penting. Dari beberapa kasus, gagalnya dialog yang terjadi di Poso adalah karena dialog dilakukan setelah terjadi konflik.

b. Mengenai Ekonomi:

Isu bahwa salah satu konflik Poso adalah kesenjangan ekonomi dapat dipahami walau masih harus dibedakan antara kecemburuan kesenjangan ekonomi yang muncul antara orang Pamaona dengan 'pendatang' atau memang akibat dari keterpurukan ekonomi secara nasional, seperti juga yang dialami oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

c. Mengenai Provokator dan Aktor Intelektual:

Asumsi dan kecurigaan masyarakat tentang adanya provokator yang berperan dalam merekayasa dan mengeksploitir konflik sangat perlu untuk disikapi dan diperhatikan.

saat Indonesia merdeka dan berdaulat, 17 Agustus 1945.

Batasan penduduk (secara nasional) sudah sangat jelas tertuang pada undang-undang yang kita miliki. Sehingga batasan penduduk adat (asli) tidak lagi memiliki konteks sebagai penduduk 'pribumi' yang telah dipopulerkan Kolonial Belanda. Penduduk/masyarakat adat/asli lebih memberikan nuansa kekayaan budaya yang mencakup adat-istiadat, bahasa dan sejarah.

Dengan memberikan pemahaman ini, tak akan ada lagi perbedaan antar pendatang dan asli. Secara nasional, penduduk yang tinggal di suatu tempat (bahkan lahir di sana) setelah kemerdekaan RI, sudah tidak dianggap sebagai pendatang. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan satu sama lainnya.

b. Pemahaman Agama:

Kekeliruan memahami agama terbukti telah menimbulkan konflik tak berujung. Untuk mengantisipasi persoalan agama ini, dibutuhkan kerja keras dari para pemuka dan tokoh agama untuk melakukan pendidikan dan pembelajaran agama sampai ke tingkat masyarakat bawah.

Konflik Poso terbukti lebih banyak terjadi di lapisan bawah. Ini membuktikan ketidakmampuan masyarakat memahami secara utuh tentang hakikat beragama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dan kesejahteraan sosial.

Diusahakan jabatan di beberapa instansi lebih karena kemampuan profesional bukan kecenderungan agama. Di Poso, hal ini yang sering muncul ke permukaan, sehingga menimbulkan rasa cemburu dan iri hati.

Para pimpinan dan elit umat

9. Saran

- a. Pemahaman Suku Bangsa/Etnik: Pemerintah dengan segera harus memberikan parameter, definisi atau batasan mengenai istilah 'penduduk asli' dan 'pendatang' secara nasional. Pendekatannya *harus* dimulai pada

beragama diharapkan mampu menjadi jembatan dan sumber intelektual 'agama' yang dapat mendorong semangat persatuan diantara umat mereka terhadap umat beragama lainnya, sampai ke masyarakat yang paling awam.

Karena potensi konflik berada pada masyarakat awam yang jarang tersentuh oleh para 'pakar agama'.

Secara inheren, yang harus diperhatikan pertama sekali, ialah merubah cara pandang umat beragama terhadap agama yang dipeluknya, bahwa kasih-sayang Allah terakumulasi pada adanya kerukunan insani di jagad raya ini. Agama bukan *simbol*, tetapi *the way of life*, yang bersama-sama harus dapat menciptakan keamanan, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Bersama-sama dengan adat-istiadat yang luhur yang pernah ada di tanah air tercinta ini, agama menjadi begitu kuat merekat jalinan setiap jiwa masyarakat di bumi Indonesia tercinta ini, sesuai falsafah yang begitu luhur yang telah ada lebih dari enam ratus tahun lalu yaitu: *Bhinneka Tunggal Ika* tan hana dharma mangrwa. Agama bukanlah sekumpulan doktrin yang mati, stagnan, tak bergerak. Bukan pula sebagai idiom, simbol-simbol ketuhanan yang kering dan salah makna.

Agama harus dipahami dan dilaksanakan sebagai kesatuan nilai yang amat personal dan realistis, dan sangat memegang prinsip kasih-sayang Allah yang meliputi alam semesta raya ini.

- c. Peningkatan komunikasi dan dialog: Dialog bukan hanya kumpul di meja

perundingan, tapi dapat melalui pendekatan sosial-budaya, agama dan ekonomi. Secara simultan, apabila pemerintah secara serius mengupayakan hal ini, tak akan pernah ada lagi pertikaian. Karena masing-masing yang bertikai sudah mempunyai kesibukan sendiri dan saling membentuk relasi sosial diantara mereka, pemerintah sebagai fasilitator.

Sebaiknya pemerintah tanggap untuk mengintensifkan dialog dalam bentuk apa saja justru sebelum terjadi konflik.

- d. Peningkatan sektor Ekonomi: Dialog yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait akan membentuk suatu relasi ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan semangat meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.

Konflik tak berujung di Poso salah satunya karena runtuhnya perekonomian daerah. Untuk itu, sangat tepat apabila pemerintah mengupayakan secara optimal peluang bisnis untuk mengangkat sumberdaya di daerah yang pada akhirnya akan mengoptimalkan sumberdaya manusia masyarakat Poso.

- e. Menciptakan Rasa Aman: Bersama-sama dengan masyarakat Poso (apapun agama dan etnik mereka) pemerintah cq aparat keamanan secara optimal melakukan *behavioral approach* (*pendekatan tingkah laku*).

Dengan kemampuannya berada bersama-sama dengan masyarakat, Polri diharapkan dapat menjadi leader untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Poso.